

**STRATEGI PENGENDALIAN KAWASAN KUMUH DI
LINGKUNGAN MARAMPESU KELURAHAN BORIBELLAYA
KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS**

SKRIPSI

Oleh

SAHRUL

NIM 45 16 042 011



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2023

**STRATEGI PENGENDALIAN KAWASAN KUMUH DI
LINGKUNGAN MARAMPESU KELURAHAN BORIBELLAYA
KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik (S.T)

UNIVERSITAS

BOSOWA

Oleh

SAHRUL

NIM. 45 16 042 011

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

STRATEGI PENGENDALIAN KAWASAN KUMUH DI LINGKUNGAN MARAMPESU KELURAHAN BORIBELLAYA KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS

Disusun dan diajukan oleh

SAHRUL
NIM. 45 16 042 011

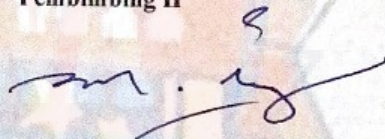
Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Tanggal 27 Februari 2023

Menyetujui.

Pembimbing I


Dr. Ir. Rudi Yatief, ST., M.Si
NIDN. 09-170768-01

Pembimbing II

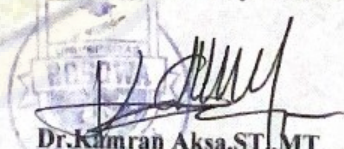

Muh. Idris Taling, ST., MSP
NIDN. 09-021075-02

Mengetahui :

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa


Dr. H. Nasrullah, ST., MT
NIDN. 090-89773-01

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota


Dr. Kamran Aksa, ST., MT.
NIDN. 09-110774-01



HALAMAN PENERIMAAN


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor: 437a/01/UNIBOS/II/2023 pada tanggal 27 Februari 2023 Tentang Pembimbing dan Penguji Ujian Akhir Skripsi Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Fakultas Teknik Universitas Bosowa Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, maka:

Pada Hari/Tanggal : Senin, 27 Februari 2023
Skripsi Atas Nama : Sahrul
Nomor Pokok : 45 16 042 011

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S-1) pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makaasar.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ir. Rudi Latief, M. Si
Sekretaris : Muh. Idris Taking, ST., MSP
Anggota : 1. Rusneni Ruslan, ST, M. Si
2. Rimba Arief, ST., M. Sc.



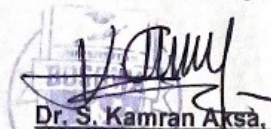
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa



Dr. Nasrullah, ST., MT.

NIDN: 09-080773-01

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota



Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT.

NIDN: 09-110774-01

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sahrul

NIM : 45 16 042 011

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tuliskan/ajukan ini benar-benar hasil karya sendiri, dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima segala bentuk konsekuensi/sanksi atas perbuatan saya.

Makassar, Februari 2023

Yang menvatakan



Sahrul

ABSTRAK

Sahrul, 2023 "*Strategi Pengendalian Kawasan Kumuh di Lingkungan Marampesu Kelurahan Boribellaya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros*".
Dibimbing oleh **Rudi Latief dan Muh.Idris Taking**.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi penyebab pengaruh terbentuknya permukiman kumuh dan mengidentifikasi strategi pengendalian terhadap kawasan kumuh di Lingkungan Marampesu Kelurahan Boribellaya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi menggunakan analisis chi square sedangkan untuk merumuskan strategi pengendalian menggunakan analisis SWOT.

Kesimpulan utama dari penelitian ini ialah yaitu Faktor Tingkat Pendidikan dan Faktor Status Kepemilikan Lahan, sedangkan faktor yang tidak berpengaruh di kawasan permukiman kumuh ini adalah Faktor Anggota Keluarga dan Faktor Status Kepemilikan Bangunan. Strategi yang digunakan yaitu memanfaatkan kesadaran masyarakat dalam menangani permukiman kumuh melalui program pemerintah terkait Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016.

Kata kunci : Strategi, Pengendalian, Permukiman Kumuh.

KATA PENGANTAR



Allahamdulillahi Rabbil'alamin. Segala puji syukur tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha Tunggal, Pencipta Alam semesta beserta isinya dan tempat berlindung bagi umat Nya. Shalawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Atas limpah rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Strategi Pengendalian Kawasan Kumuh di Lingkungan Marampesu Kelurahan Boribellaya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros”** penelitian ini berisikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman kumuh dan strategi pengendalian perkembangan permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Marampesu Kelurahan Boribellaya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta **Paheria** dan **Ayahanda Majedi Sattuang** yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya serta perhatian moril dan materilnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas segala didikan serta budi baik dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Olehnya dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pemberi segalanya atas rahmat, karunia dan kemudahan yang diberikan kepada penyusun.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST.,MSi selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Ir Nasrullah, ST., M.T Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr. S. Kamran Aksa ST., M.T Selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak Dr. Ir. Rudi Latief, M.Si selaku Pembimbing pertama yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Muh.Idris Taking.ST.,MSP selaku Pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Rusneni Ruslan, ST, M.Si dan Bapak Rimba Arief, ST.,Msc selaku dosen penguji.
8. Seluruh Dosen Prodi Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar yang tidak saya sebutkan

satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama duduk di bangku perkuliahan sejak awal sampai selesai.

9. Pihak Instansi pemerintah Kecamatan Turikale dan seluruh Masyarakat Marampesu Kabupaten Maros yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada kakak kandung saya Ardianto, Arniati, Asrianti, Arwin yang tercinta terimah kasih atas do'a, dukungan dan motivasi yang selalu di berikan semangat sampai saat ini.
11. Kepada saudara/I Deo Fernando Hose,ST, Kristianto Erdiansyah Widodo,ST, Yudistira Taufiq Hidayat,ST, Hakim Asura,ST, Tirta Hastyn,ST, Bernadeth Paembong,ST, Rivqa Musjhtahida Arsyad, ST, yang telah bersedia menemani penulis dikesehariannya dan memberikan dukungan serta motivasi.
12. Kepada saudara Dwi Agung Sutopo dan Muhammad Rizkiawan telah menyempatkan waktu menemani saya untuk survey pengambilan data lapangan di Kawasan Lingkungan Marampesu Kelurahan Boribellaya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.
13. Kepada seluruh sahabat dan saudara-saudaraku seperjangan PWK 2016 (SPACE016), yang selalu saling memberikan support dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi sistematika penulisan dan isinya. Oleh karena itu, dengan indra dan saran demi penyempurnaan skripsi ini

kedepannya. Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar,

Februari 2023

Penulis

SAHRUL



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENERIMAAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Permukiman.....	11
B. Permukiman Kumuh.....	13
C. Faktor-Faktor Penyebab Terbentuknya Permukiman	
D. Kumuh.....	19
E. Kerangka Berfikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44

B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Waktu Penelitian.....	47
D. Populasi dan Sampel.....	48
E. Jenis dan Sumber Data.....	49
F. Variabel Penelitian.....	50
G. Metode Analisis.....	51
H. Defenisi Operasional.....	65
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Gambaran Umum.....	67
1. Gambaran Umum Kabupaten Maros.....	67
a. Letak Geografis dan Administrasi.....	67
b. Kondisi Topografi dan Kelerengan.....	68
c. Kondisi Geologi dan Tanah.....	70
d. Kondisi Klimatologi	73
e. Kondisi Hidrologi.....	73
2. Gambaran Umum Kecamatan.....	76
a. Letak Geografis Dan Administratif	76
b. Kondisi Topografi.....	78
c. Kondisi Geologi Dan Jenis Tanah	78
d. Aspek Kependudukan	79
3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	83
a. Profil dan karakteristik Responden	84
B. Analisis Faktor penyebab terbentuknya permukiman	

Kumuh.....	85
a. Analisis Deskriptif	85
b. Analisis Chi-Square	99
C. Hasil Analisis Faktor Penyebab Tumbuh Kembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan Lingkungan Marampesu Kelurahan Boribellaya.....	106
D. Analisis Strategi Pengendalian Terhadap Tumbuh Kembangnya Permukiman Di Lingkungan Marampesu Kelurahan Boribellaya.....	108
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Schedule Pelaksanaan penelitian/Skripsi	47
Tabel 3.2	Matriks Metode Analisis Data	53
Tabel 3.3	Penentuan Skala Likert	56
Tabel 3.4	Matriks IFE (Internal Factor Evaluation).....	61
Tabel 3.5	Matriks EFE (Eksternal Factor Evalution)	63
Tabel 3.6	Matriks Analisis SWOT	64
Tabel 4.1.	Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kecamatan di Kabupaten maros	70
Tabel 4.2.	Klasifikasi Jenis Tanah Di Kabupaten Maros	74
Tabel 4.3.	Luas Wilayah Dan Jarak Ibukota Kecamatan Dan Ibukota Kabupaten Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Turikale Tahun 2022	78
Tabel 4.4.	Jumlah Penduduk Dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Turikale Tahun 2022	81
Tabel 4.5.	Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan Di Kecamatan Turikale Tahun 2022	82
Tabel 4.6.	Hasil Kuesioner Penelitian	100
Tabel 4.7.	Uji Chi Kuadrat Pengaruh Penyebab Permukiman Kumuh Terhadap Faktor Pendapatan (X1)	100
Tabel 4.8.	Uji Chi Kuadrat Pengaruh Penyebab Permukiman Kumuh Terhadap Faktor Tingkat Pendidikan (X2)	102

Tabel 4.9. Uji Chi Kuadrat Pengaruh Penyebab Permukiman Kumuh Terhadap Faktor Jumlah Anggota Keluarga (X3)	103
Tabel 4.10. Uji Chi Kuadrat Pengaruh Penyebab Permukiman Kumuh Terhadap Faktor Status Kepemilikan Bangunan (X4)	104
Tabel 4.11. Uji Chi Kuadrat Pengaruh Penyebab Permukiman Kumuh Terhadap Faktor Status Kepemilikan Lahan (X5)	105
Tabel 4.12. Pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Y	108
Tabel 4.13. Analisis SWOT	109
Tabel 4.14. Strategi Internal	110
Tabel 4.15. Strategi Eskternal	110
Tabel 4.16. Nilai Skor IFAS	110
Tabel 4.17. Nilai Skor EFAS	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	43
Gambar 3.1	Peta Lokasi Penelitian	46
Gambar 3.2	Kuadran SWOT	65
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Maros	76
Gambar 4.2	Peta Administrasi Kecamatan Turikale	83
Gambar 4.3	Visualisasi Bangunan di Kawasan Lingkungan Marampesu.....	87
Gambar 4.4	Peta Sebaran Permukiman Kumuh.....	88
Gambar 4.5	Peta Sebaran Permukiman Kumuh Berdasarkan Luasan (Ha)	89
Gambar 4.6	Visualisasi Jaringan Jalan di Kawasan Lingkungan Marampesu	91
Gambar 4.7	Visualisasi Air Bersih Di Kawasan Lingkungan Marampesu	93
Gambar 4.8	Visualisasi Air Limbah Di Kawasan Lingkungan Marampesu	95
Gambar 4.9	Visualisasi Sistem Persampahan Di Kawasan Lingkungan Marampesu	97
Gambar 4.10	Kuadran SWOT	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu kota bagi negara-negara yang sedang membangun berlangsung relatif pesat karena daya tarik kota sangat kuat, baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomi (Suud & Navitas, 2015). Salah satu permasalahan pembangunan di perkotaan adalah munculnya arus urbanisasi yang semakin deras diakibatkan ketimpangan laju pembangunan di kota dibandingkan dengan di desa. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sosial demografis di kawasan kumuh seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta minimnya fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana sosial budaya. Secara sosiologis permukiman kumuh adalah suatu permukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis, dengan gambaran dan kesan secara umum tentang masyarakat yang hidup dengan sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah ke bawah. Hal tersebut menjadi interpretasi umum bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh adalah pemukim yang tinggal atau

berada didalam suatu lingkungan yang rendah kualitasnya dengan belum terpenuhinya standar pelayanan minimal manusia untuk hidup dengan layak.

Kawasan permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Telaah tentang kawasan permukiman kumuh (slum), pada umumnya mencakup tiga segi, pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut, dan ketiga dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Pentingnya penanganan permasalahan permukiman kumuh ini, sejalan dengan yang ditegaskan dalam UU No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman bahwa penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk (1) Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia; (2) Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur (Putro, 2011).

Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, kumuh dianalogikan sebagai permukiman dengan kondisi hunian rumah buruk dan kurangnya pelayanan infrastruktur permukiman dengan kondisi ekonomi pemukim yang mencerminkan kurang mampu atau miskin. Penggunaan ruang tersebut kerap kali berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul kantong-kantong permukiman pada daerah sempadan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau atau lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (squatters). Keadaan demikian yang menunjukkan bahwa penghuninya kurang mampu untuk membeli dan menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan / bangunan yang tinggi, sedangkan lahan kosong di daerah perkotaan sudah tidak ada. Permukiman tersebut muncul dengan sarana dan prasarana kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan penghuni.

Permasalahan permukiman kumuh perkotaan sering kali menjadi salah satu isu utama yang cukup menjadi polemik, sehingga seperti tidak pernah terkejar oleh upaya penanganan yang dari waktu ke waktu sudah dilakukan. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan

dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat.

Permasalahan permukiman kumuh perkotaan yang kemudian terjadi di Kabupaten Maros tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan. Secara umum, Undang-Undang ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam Pasal 1 poin (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, dinyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat, agar

masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam mewujudkan fungsi permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Maros telah berupaya melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Maros dengan harapan mampu memberikan rekomendasi aksi dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kabupaten Maros. Berdasarkan hasil identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh yang telah dimutakhirkan hingga tahun 2020 oleh Direktorat Pengembangan Permukiman, telah didapatkan jumlah luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Indonesia sebesar 37.407 Ha, dimana untuk Kabupaten Maros sendiri permukiman kumuhnya seluas 105,56 Ha sesuai SK Bupati Maros No.1169/KPTS/050.13/IX/2020 tentang penetapan lokasi Kawasan permukiman kumuh. Luasan tersebut menjadi baseline

data yang telah disepakati antara Pemerintah dan Pemda untuk ditangani menjadi nol luasan kumuh

hingga tahun 2020, namun demikian belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh mengingat keterbatasan biaya, peralatan dan fasilitas lainnya.

Berbicara mengenai permasalahan permukiman kumuh perkotaan, nampaknya patut diperhatikan di Lingkungan Marampesu Kelurahan Boribellaya yaitu Kecamatan Turikale, dimana sebagian masyarakat hidup dengan kualitas lingkungan permukiman yang dikategorikan termasuk kumuh. Tidak dapat disangkal bahwa kondisi lingkungan permukiman di kawasan tersebut sangat tidak sehat, timbulnya pencemaran lingkungan seperti: bau yang kurang sedap, lahan yang kotor akibat tertutup oleh sampah yang berserakan, pembuangan limbah rumah tangga yang menumpuk. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang hidup dalam satu bangunan rumah dengan lebih dari satu anggota keluarga, pendapatan dan mata pencaharian masyarakat perkotaan yang tidak menentu sebagai buruh harian. Gambaran tersebut patut untuk dikaji faktor apa yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya

permukiman kumuh dan kemudian membuat strategi mengenai pengendalian perkembangan permukiman kumuh di Kawasan perkotaan Kabupaten Maros yang terletak di Lingkungan Marampesu Kelurahan Boribellaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pada pembahasan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh di kawasan Lingkungan Marampesu Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.?
2. Bagaimana strategi pengendalian perkembangan permukiman kumuh di Lingkungan Marampesu Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu :

- a. Untuk mengidentifikasi penyebab pengaruh terbentuknya permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Marampesu Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.
- b. Untuk mengidentifikasi strategi pengendalian terhadap perkembangan permukiman kumuh di Kawasan

Lingkungan Marampesu Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

2. Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan, maka kegunaan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengidentifikasi penyebab pengaruh terbentuknya permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Marampesu Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.
- b. Untuk mengetahui strategi pengendalian terhadap perkembangan permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Marampesu Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

D. Batasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian perlu dilakukan agar lebih fokus dan spesifik berdasarkan variabel penelitian untuk untuk menjawab faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh, aspek kajian variabel terbagi atas dua faktor yaitu: faktor fisik dan faktor sosial ekonomi. Faktor fisik terdiri atas: kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan pengamanan proteksi kebakaran dan faktor sosial ekonomi terdiri atas: faktor pendapatan, faktor tingkat pendidikan, faktor anggota

keluarga, faktor kepemilikan bangunan dan faktor status kepemilikan lahan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini merupakan tahapan- tahapan dalam proses penyusunan laporan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah mengenal dan memahami substansi dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang faktor pengaruh terbentuknya permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Marampesu Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini menguraikan tentang metode dalam melakukan penelitian berupa lokasi penelitian, waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis, dan definisi operasional

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi pembahasan terkait hasil data yang telah di dapatkan serta menganalisa kondisi eksisting permukiman kumuh dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Marampesu Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Permukiman

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sementara permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang

Permukiman menurut Vernor C. Vinch dan Glenn T. Trewartha dalam R. Bintarto (1977), menyatakan permukiman tempat kediaman penduduk adalah suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama, dimana mereka membangun rumah-rumah, jalan dan sebagainya guna kepentingan mereka.

Permukiman merupakan suatu lingkungan hidup yang berada diluar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal serta tempat kegiatan usaha dan kerja yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Hal inilah yang menjadikan pada tingkat lebih lanjut, dalam hal ini permukiman diberikan fungsi sebagai penyangga dari kawasan yang fungsional serta kawasan produktif lainnya. Seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Permukiman yang di maksud adalah :

1. Rumah adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk bertempat tinggal dan sebagai sarana untuk pembinaan keluarga.
2. Perumahan ialah dimana rumah yang berkelompok yang berfungsi sebagai tempat untuk tinggal dan sebagai lingkungan hunian yang dilengkapi prasarana dan sarana lingkungan yang memadai.

3. Permukiman sebagai bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang serupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
4. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.

Permukiman adalah suatu wadah atau wujud fisik budaya yang saling mempengaruhi dengan yang lain dan juga berhubungan dengan lingkungan yang sudah ada atau lingkungan alami sebagai tempatnya. (Hamidah, Rijanta, Setiawan, & Rifai, 2014).

B. Permukiman Kumuh

Menurut Yudohusodo (1991), permukiman kumuh adalah suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak berstruktur, tidak berpola misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersediany fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih, MCK bentuk fisiknya yang tidak layak misalnya secara reguler tiap tahun banjir.

Menurut Budiharjo (1997), permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan

peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan kehidupan penghuninya (Budiharjo: 1997).

Menurut Suparlan (2002), dalam Syaiful. A (2002) bahwa permukiman dapat digolongkan sebagai permukiman kumuh karena, *pertama*, kondisi dari permukiman tersebut ditandai oleh bangunan rumah-rumah hunian yang dibangun secara semrawut dan memadati hampir setiap sudut permukiman, dimana setiap rumah dibangun diatas tanah tanpa halaman. *Kedua*, jalan-jalan yang ada diantara rumah-rumah seperti labirin, sempit dan berkelok-kelok, serta becek karena tergenang air limbah yang ada disaluran yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. *Ketiga*, sampah berserakan dimana-mana, dengan udara yang pengap dan berbau busuk. *Keempat*, fasilitas umum kurang atau tidak memadai. *Kelima*, kondisi fisik hunian atau rumah pada umumnya mengungkapkan kemiskinan dan kekumuhan, karena tidak terawat dengan baik.

1. Karakteristik Permukiman Kumuh

Pada umumnya permukiman kumuh diwarnai oleh tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, tingkat kepadatan

hunian sangat tinggi, tingkat kepadatan bangunan yang sangat tinggi, kualitas rumah sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka/rekreasi/sosial, fasilitas pelayanan kesehatan, perbelanjaan dan sebagainya. Selain itu juga diwarnai oleh tingkat pendapatan penghuninya yang rendah, tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah, tingkat privasi keluarga yang rendah serta kohesivitas komunitas yang rendah karena beragamnya norma sosial budaya yang dianut.

Kumuh atau slum adalah permukiman atau perumahan orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat di pinggir-pinggir jalan atau lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan atau juga biasa disebut dengan wilayah pencomberan oleh Suparlan. Tetapi pada perincian ini permukiman kumuh dianggap sebagai tempat anggota masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan rendah dengan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi minim.

(Raharjo, 2005:147). Kurangnya perencanaan kota dan kebijakan Permukiman telah menyebabkan penciptaan permukiman kumuh di daerah perkotaan (Uddin, 2018).

Kawasan kumuh tersebut menyebabkan batasan ruang huni yang ditempati masyarakat Indonesia masih kurang memadai, kurang nyaman dan berdampak buruk pada lingkungan Permukimannya. Permukiman kumuh pada dasarnya memiliki kondisi perumahan yang dibawah standar dengan kepadatan tinggi dan tidak sehat. Permukiman kumuh ini dapat ditangani melalui penyadaran masyarakat melalui program pemerintah, LSM, dan sektor swasta (Uddin, 2018). Charter Adam (1984) menamakan permukiman di lingkungan kumuh sebagai kampung gembel dengan ciri bangunan liar di atas tanah yang tidak sah. Menurut E.E. Bergel (1970) permukiman kumuh disebutnya sebagai daerah slum yang bukan saja dari segi fisik tetapi juga dari segi sosial. Soemadi (1990) menyatakan perkampungan kumuh adalah bagian dari kota yang jorok, bangunan-bangunan yang tidak memenuhi syarat dan kesehatan serta didiami oleh orang miskin dengan fasilitas tempat pembuangan sampah, maupun fasilitas air bersih tidak memenuhi syarat kesehatan.

Menurut UU No. 1 Pasal 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Permukiman Kumuh adalah Permukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan

prasarana yang tidak memenuhi syarat. Adapun Karakteristik Permukiman kumuh menurut Johan Silas :

- a. Keadaan rumah pada permukiman kumuh terpaksa dibawah standar rata-rata $6 \text{ m}^2/\text{orang}$. Sedangkan fasilitas perkotaan secara langsung tidak terlayani karena tidak tersedia. Namun karena lokasinya dekat dengan permukiman yang ada, maka fasilitas lingkungan tersebut tak sulit mendapatkannya.
- b. Permukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu dekat tempat mencari nafkah (opportunity value) dan harga rumah juga murah (asas keterjangkauan) baik membeli atau menyewa. Manfaat permukiman disamping pertimbangan lapangan kerja dan harga murah adalah kesempatan mendapatkannya atau aksesibilitas tinggi. Hampir setiap orang tanpa syarat yang bertele-tele pada setiap saat dan tingkat kemampuan membayar apapun, selalu dapat diterima dan berdiam di sana.

2. Kriteria Umum Permukiman Kumuh :

- 1) Mandiri dan produktif dalam banyak aspek, namun terletak pada tempat yang perlu dibenahi.
- 2) Keadaan fisik hunian minim dan perkembangannya lambat.
- 3) Para penghuni lingkungan permukiman kumuh pada umumnya bermata pencaharian tidak tetap dalam usaha non formal dengan tingkat pendidikan rendah.
- 4) Pada umumnya penghuni mengalami kemacetan mobilitas pada tingkat yang paling bawah, meskipun tidak miskin serta tidak menunggu bantuan pemerintah, kecuali di buka peluang untuk mendorong mobilitas tersebut.
- 5) Ada kemungkinan dilayani oleh berbagai fasilitas kota dalam kesatuan program pembangunan kota pada umumnya.
- 6) Kehadirannya perlu dilihat dan diperlukan sebagai bagian sistem kota yang satu, tetapi tidak semua begitu saja dapat dianggap permanen.

3. Kriteria Khusus Permukiman Kumuh :

- 1) Berada di lokasi tidak legal.
- 2) Dengan keadaan fisik yang substandar, penghasilan penghuninya amat rendah (miskin).
- 3) Tidak dapat dilayani berbagai fasilitas kota.

- 4) Tidak diinginkan kehadirannya oleh umum (kecuali yang berkepentingan).
- 5) Permukiman kumuh selalu menempati lahan dekat pasar kerja (non formal), ada sistem angkutan yang memadai dan dapat dimanfaatkan secara umum walau tidak selalu.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terbentuknya Permukiman Kumuh

Menurut Budiharjo (2011), kondisi permukiman kumuh dipertanian, banyak dipengaruhi oleh karakteristik fisik dan sosial yang ada pada masyarakat. Karakteristik fisik dan sosial yang diperkirakan berpengaruh terhadap permukiman kumuh pertanian ini adalah : tingkat pendapatan, status kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan penilaian masyarakat terhadap lingkungan permukimannya. Pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kondisi permukiman kumuh akan dikemukakan berikut ini :

- Faktor Pendapatan
- Faktor Tingkat Pendidikan
- Faktor Mata Pencaharian
- Faktor Anggota Keluarga
- Faktor Status Kepemilikan Lahan dan Bangunan

Pada dasarnya suatu permukiman kumuh terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu tana/lahan, rumah/perumahan, komunitas, sarana dan prasarana dasar, yang terajut dalam suatu sistem lokal, sistem ekonomi dan budaya baik dalam suatu ekosistem lingkungan permukiman kumuh itu sendiri atau ekosistem kota. Oleh karena itu permukiman kumuh harus senantiasa dipandang secara utuh dan integral dalam dimensi yang lebih luas. Beberapa dimensi permukiman kumuh yang menjadi penyebab tumbuhnya permukiman adalah sebagai berikut :

1. Faktor Urbanisasi dan Migrasi Penduduk

Pengertian urbanisasi merupakan substansi pergeseran atau transformasi perubahan corak sosio-ekonomi masyarakat perkotaan yang berbasis industri dan jasa-jasa menurut (Tommy Firman, 1996). Substansi tentang urbanisasi yaitu proses modernisasi wilayah desa menjadi kota sebagai dampak dari tingkat keurbanan (kekotaan) dalam suatu wilayah (region) atau negara. Konsekuensinya adalah terjadi perpindahan penduduk (dengan aktifitas ekonominya) secara individu atau kelompok yang berasal dari desa menuju kota atau daerah hinterland lainnya. Hal ini perlu dibedakan dengan pengertian tingkat pertumbuhan kota (urban growth) yang diartikan sebagai laju (rate)

kenaikan penduduk kota, baik skala mandiri maupun kebersamaan secara nasional.

Ukuran tingkat keurbanan, biasanya dalam konteks kependudukan yaitu dengan memproporsikan antara jumlah penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk nasional. Tetapi masalah urbanisasi tidak harus diinterpretasikan dalam konteks kependudukan semata, kenyataannya harus mencakup dimensi perkembangan dan kondisi sosial, ekonomi masyarakat, bahkan lebih jauh mencakup pula aspek budaya dan politik. Pada intinya dalam aspek kegiatan ekonomi, Rumusan beberapa faktor secara umum yang dapat mempengaruhi terjadinya proses keurbanan, antara lain:

- a. Ketimpangan tingkat pertumbuhan ekonomi antara desa dengan perkotaan.
- b. Peluang dan kesempatan kerja yang lebih terbuka di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan.
- c. Terjadinya pola perubahan minat tentang lapangan pekerjaan dari pertanian ke industri, utamanya bagi penduduk usia kerja di perdesaan.

d. Lebih majunya teknologi dan infrastruktur prasarana transportasi, sehingga memudahkan terjadinya mobilitas penduduk baik yang permanen atau yang ulang alik, Keberadaan fasilitas perkotaan yang lebih menjanjikan, utamanya aspek pendidikan, kesehatan, pariwisata dan aspek sosial lainnya.

Proses urbanisasi perkotaan adalah suatu gejala umum yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang. Proses pembangunan yang berlangsung relatif pesat. Karena daya tarik kota sangat kuat, baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis. Keadaan daerah perdesaan yang serba kekurangan merupakan pendorong yang kuat dalam meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota besar.

Bagi kota yang mulai padat penduduknya, penambahan penduduk tiap tahunnya jauh melampaui penyediaan kesempatan kerja didalam wilayahnya sehingga dirasakan menambah berat permasalahan kota. Tekanan ekonomi dan kepadatan tinggal bagi kaum urban memaksa mereka menempati daerah-daerah pinggiran (slum area) hingga membentuk lingkungan permukiman kumuh.

Migrasi sebenarnya telah berkembang dan berbagai ahli telah banyak membahas tentang teori migrasi tersebut dan

sekaligus melakukan penelitian tentang migrasi. Lee dalam Yoeliani, P (1966) mendekati migrasi dengan formula yang lebih terarah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk bermigrasi dapat dibedakan atas kelompok sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat asal migran.
- b. Faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat tujuan migran (destination).
- c. Faktor-faktor penghalang atau pengganggu (intervening factors).
- d. Faktor-faktor yang berhubungan dengan individu migran.

Faktor-faktor yang ada di tempat asal migran maupun di tempat tujuan migran dapat terbentuk faktor positif maupun faktor negatif. Faktor-faktor di tempat asal migran misalnya dapat berbentuk faktor yang mendorong untuk keluar atau menahan untuk tetap dan tidak berpindah. Di daerah tempat tujuan migran faktor tersebut dapat berbentuk penarik sehingga orang mau datang kesana atau menolak yang menyebabkan orang tidak tertarik untuk datang. Tanah yang tidak subur, penghasilan yang rendah di daerah tempat asal migran merupakan pendorong untuk pindah. Namun rasa

kekeluargaan yang erat, lingkungan sosial yang kompak merupakan faktor yang menahan agar tidak pindah.

Upah yang tinggi, kesempatan kerja yang menarik di daerah tempat tujuan migran merupakan faktor penarik untuk datang kesana namun ketidakpastian, resiko yang mungkin dihadapi, pemilikan lahan yang tidak pasti dan sebagainya merupakan faktor penghambat untuk pindah ke tempat tujuan migran tersebut.

Keberadaan penduduk migran di permukiman kumuh yang menempati lahan milik pemerintah atau milik publik, dapat dikategorikan sebagai hunian ilegal atau lazim disebut hunian liar (squatter). Hal ini jelas telah menimbulkan konflik antara penghuni dengan instansi yang bertanggung jawab atas lahan yang ditempatinya, Meskipun mereka tinggal pada permukiman liar, namun mereka juga membentuk lembaga Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), bahkan sebagian dapat menikmati penerangan listrik, ada pula yang punya telepon rumah, dan tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mereka juga telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Penduduk pendatang yang kurang selektif, meskipun telah memberi kontribusi negatif terhadap kondisi lingkungan kota karena telah menciptakan permukiman kumuh dengan segala implikasinya, namun sebenarnya mereka juga memberi kontribusi positif bagi pembangunan Kota. Kota Kendari telah memperoleh alokasi sumberdaya manusia dari daerah perdesaan. Sumberdaya manusia asal perdesaan kendati kualitasnya rendah, namun mereka telah menjadi bagian dari ekosistem perkotaan yang secara langsung menyumbangkan jasa tenaga kerja murah, dan menyediakan produksi skala rumah tangga, terutama sangat diperlukan bagi usaha formal maupun masyarakat golongan menengah ke atas, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai bagian dari segmen pasar, bahkan sebagai distributor komoditi pabrikan. Keberadaan permukiman kumuh yang dapat menyediakan perumahan murah, juga sangat membantu penduduk kota yang menginginkannya, misalnya buruh pabrik atau pegawai daerah golongan rendah yang memerlukan kamar sewaan ataupun kontrakan yang relatif murah.

2. Faktor Lahan di Perkotaan

Pertumbuhan dan perkembangan kota yang sangat pesat telah menyebabkan berbagai persoalan serius diantaranya adalah permasalahan perumahan. Permasalahan perumahan sering disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penyediaan unit hunian bagi kaum mampu dan kaum tidak mampu di perkotaan. Di samping itu sebagian kaum tidak mampu tidak menguasai sumber daya kunci untuk menopang kehidupannya, sehingga kaum tidak mampu ini hanya mampu tinggal di unit-unit hunian sub standar di permukiman yang tidak layak.

Permasalahan perumahan di atas semakin memberatkan kaum tidak mampu ketika kebijakan investasi pemanfaatan lahan mengikuti arus mekanisme pasar tanpa mempertimbangkan secara serius pentingnya keberadaan hunian yang layak bagi kaum miskin dipertanian. Investasi pemanfaatan lahan yang salah, semata-mata berpihak pada kaum mampu pada akhirnya mendorong lingkungan permukiman kaum tidak mampu yang tidak layak ini terus mengalami penurunan kualitas dan rentan masalah sosial lainnya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana Dasar

Sarana dan prasarana memiliki arti yang sama dengan fasilitas dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan, sedangkan menurut Subroto di dalam Arianto (2008), fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda maupun uang.

Secara umum karakteristik permukiman kumuh diwarnai juga oleh tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar seperti halnya suplai air bersih, jalan, drainase, jaringan sanitasi, listrik, sekolah, pusat pelayanan kesehatan, ruang terbuka, pasar dan sebagainya. Bahkan hampir sebagian besar rumah tangga di lingkungan permukiman kumuh ini mempunyai akses yang sangat terbatas terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar tersebut.

Rendahnya kemampuan pelayanan sarana dan prasarana dasar ini pada umumnya disebabkan kemampuan pemerintah yang sangat terbatas dalam pengadaan serta pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, kemampuan dan kapasitas serta kesadaran masyarakat juga

terbatas pula. Bahkan juga disebabkan pula oleh terbatasnya peran berbagai lembaga maupun individu atau pihak di luar pemerintah, baik secara profesional atau sukarela dalam peningkatan permasalahan sarana dan prasarana dasar.

4. Faktor Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi menurut Soerjono Soekanto (2007:89) adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam berhubungan dengan sumber daya.

Di sisi lain, pada kenyataannya penghuni lingkungan permukiman kumuh yang sebagian besar berpenghasilan rendah itu memiliki potensi berupa tenaga kerja kota yang memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap kegiatan perekonomian suatu kota. aktivitas ekonomi di sektor informal terbukti telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berlangsungnya kehidupan produksi melalui sektor informal.

Dengan demikian tingkat pendapatan penghuni lingkungan permukiman kumuh yang rendah ini merupakan permasalahan yang serius keberlangsungan produktivitas suatu kota. Permasalahan sosial ekonomi merupakan salah

satu pendorong meningkatnya arus urbanisasi dari desa ke kota, dari daerah pinggiran ke pusat kegiatan ekonomi sehingga menumbuhkan lingkungan permukiman kumuh baru.

ketidakmampuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi faktor penyebab munculnya permukiman kumuh di daerah perkotaan maupun di daerah pesisir. Keterbatasan penghasilan akibat dari semakin sulitnya mencari pekerjaan di daerah perkotaan membuat masyarakat yang berada di garis kemiskinan semakin kesulitan untuk menyediakan perumahan yang layak huni bagi mereka sendiri.

Ketika kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi, Masyarakat berusaha dengan orientasi memenuhi kebutuhan hidup. Dan, ketika mereka berhadapan dengan keterbatasan pekerjaan formal yang jelas strukturnya, mereka menciptakan pekerjaan-pekerjaan informal yang memberi peluang untuk melangsungkan kehidupan. Tercukupinya kebutuhan hidup adalah konsep sederhana tentang kebahagiaan yang dimiliki oleh kaum miskin. Namun, dalam usaha mereka tersebut, mereka berhadapan dengan roda pembangunan ciptaan penguasa yang tidak berpihak pada mereka.

Persoalan ketidak mampuan ekonomi merupakan imbas urbanisasi, lonjakan pengangguran, serta tingginya tuntutan dan biaya hidup yang memaksa manusia kota kreatif untuk berusaha di bidang ekonomi. Berdasar survei BAPPENAS pada 2002, kuantitas pekerja di sektor informal selalu paralel dengan tingkat Pemutusan Hubungan Kerja serta angka pengangguran. Semakin tinggi angka Pemutusan Hubungan Kerja dan tingkat pengangguran, berarti jumlah Pekerja pada sektor informal juga akan bertambah. Urbanisasi juga menyumbang pertambahan pekerja pada sektor informal lantaran para pendatang dari perdesaan umumnya tak memiliki keterampilan yang memadai di sektor formal. (Jawa Pos, 17/02/06).

Aktivitas-aktivitas formal tidak terbatas pada pekerjaan- pekerjaan dipinggiran kota saja, tetapi bahkan juga meliputi berbagai aktivitas ekonomi. Aktivitas-aktivitas ekonomi informal adalah cara melakukan sesuatu yang ditandai dengan:

- a. Mudah untuk dimasuki
- b. Bersandar pada sumber daya local
- c. Usaha milik sendiri
- d. Operasinya dalam skala kecil

- e. Padat karya dan teknologinya bersifat adaptif
- f. Keterampilan dapat diperoleh diluar sistem sekolah formal
- g. Tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.

Aktivitas-aktivitas sektor informal pada umumnya dikesampingkan, jarang didukung, bahkan seringkali diatur oleh aturan yang ketat, dan terkadang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Menurut Daldjoeni (1987), mereka yang masuk ke dalam sektor informal adalah mereka yang harganya berada di kelas dua, artinya bahwa mereka yang orientasi pemasarannya untuk golongan menengah ke bawah. Untuk itu, mereka harus lebih diformalkan, lebih dipadatmodalkan, lebih ditatabukukan, lebih dibadanhukumkan, dan lebih dikenai pajak.

Secara implisit dalam kegiatan perdagangan, kegiatan informal dalam bentuk pedagang kaki lima. Ditinjau dari karakteristik kehadirannya, timbul sektor informal karena :

- a. Tingkat persaingan pekerjaan yang tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.
- b. Tidak adanya hubungan kerja kontrak jangka panjang seperti halnya yang dimiliki oleh sektor formal, sehingga

mengakibatkan mobilitas angkatan kerja dalam sektor informal menjadi relatif lebih tinggi.

c. Meningkatkan arus urbanisasi.

Ketidakmampuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, untuk membangun rumah yang layak huni menambah daftar panjang permasalahan permukiman kumuh dipertanian dan daerah pesisir. Jika golongan miskin dianggap tidak mampu untuk membantu dirinya sendiri dalam membangun rumah yang layak huni maka mereka seharusnya dibantu. Dalam konteks perumahan, kecenderungan ini berarti hanya pemerintah sajalah yang mampu membangun perumahan yang layak huni bagi masyarakat miskin. Menurut Turner dalam Alan gilbert dkk, pemerintah sebaiknya membangun perumahan swadaya. Dan itu akan terjadi manakala masyarakat miskin tersebut memahami peranannya bahwa perumahan merupakan bagian dari hidup mereka.

5. Faktor Sosial Budaya

Menurut Betrand (dalam Darsono Wisadirana, 2005) masyarakat merupakan hasil dari suatu perubahan budaya dan akumulasi budaya. Jadi masyarakat bukan sekedar jumlah penduduk saja melainkan sebagai suatu sistem yang

dibentuk dari hubungan antar mereka. Sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Dimana dari hubungan antar mereka ini terbentuk suatu kumpulan manusia kemudian menghasilkan suatu budaya. Jadi masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Permukiman kumuh juga sering ditandai oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah. Pada umumnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah ini sangat erat dengan rendahnya tingkat pendapatan penduduk sehingga membatasi akses terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, struktur sosial penghuni lingkungan permukiman sangat majemuk dengan beragam norma-norma sosialnya masing-masing. Keragaman ini kadangkala menimbulkan kesalahpahaman, saling tidak percaya antar penghuni, yang menyebabkan rendahnya tingkat kohesivitas komunitas. Masing-masing mengikuti struktur hubungan antar sesama dan budaya yang beragam, yang mempengaruhi bagaimana sebuah individu, keluarga dan tetangga dalam berinteraksi di lingkungannya. Sehingga terkadang menjadi sulit untuk membentuk suatu lembaga

yang berbasis pada masyarakat atau upaya-upaya peningkatan kesejahteraan bersama.

Konflik sosial antar warga kota dapat dilihat dari konflik mencari pekerjaan dan semakin tingginya angka kejahatan dikota membuat kota semakin tidak aman bagi masyarakat perkotaan.

Argumen disorganisasi atau nuansa kota yang aman hampir tidak dapat disangkal bahwa rasa aman yang tinggal di kota semakin hilang. Ini adalah hasil dari perilaku yang terlepas dari kontrol sosial atas nilai-nilai masyarakat. Migran desa-kota cenderung berharap bahwa mereka akan dapat meningkatkan posisi sosial ekonomi mereka ketika bermigrasi ke kota. Mereka dipenuhi dengan pemikiran untuk menjalin hubungan kerja dan nilai finansial yang akan diperoleh selama berada di kota. Namun perlu diperhatikan bahwa persaingan di kota jauh lebih besar daripada di desa (Darsono Wisadirana, 2004).

Orang yang tidak memiliki kemampuan/keterampilan dan potensi akan tersisih dari dunia usaha formal. Alhasil, untuk mencari pekerjaan mereka menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan terjun di sektor usaha informal.

Kasus kejahatan yang dapat terjadi dari konflik sosial adalah dari semakin melebarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang tidak mampu bersaing. Kemudian kejahatan muncul sebagai jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih cepat. Pencurian dan perampokan dipermudah dengan tidak adanya sosialisasi dengan sikap acuh tak acuh individualistis di kalangan masyarakat. Dan sesama manusia tidak saling mengenal dan puas dengan kehidupan subsistem. Tetapi kaum miskin kota mungkin tidak punya pilihan selain mencuri dan merampok untuk mempertahankan hidup mereka. Terkadang ada juga perampokan dan pencurian terorganisir dengan modus yang berbeda. Konflik

Orang yang bermigrasi ke kota juga membawa nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat pedesaan. Sementara itu, masyarakat perkotaan yang heterogen memiliki ciri khasnya masing-masing. Salah satu ciri masyarakat perkotaan dalam Alan Gilbert mengungkapkan bahwa ciri-ciri masyarakat perkotaan dicirikan sebagai berikut :

- a. Lebih terbuka terhadap perubahan,
- b. Kota pintu gerbang ide-ide dan budaya yang baru,

- c. Masyarakat kota lebih kritis terhadap perubahan harga barang dan lainnya,
- d. Lebih rasional,
- e. Faktor pendidikan dan informasi sangat dibutuhkan,
- f. Proses individualisme, lebih mencolok dibandingkan dengan suasana kekeluargaan,
- g. Aktivitas dan jarak sosial yang lebih padat, h. Dikelompokkan oleh kepentingan,
- h. Kerawanan dan berdampak pada persaingan dan agresivitas,
- i. Keragaman pekerjaan dari sektor industri maupun sektor jasa.

Masyarakat dan budaya sebenarnya merupakan manifestasi dari perilaku manusia. Antara masyarakat dan budaya dalam kehidupan nyata, keduanya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial seperti dua sisi mata uang. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki budaya atau sebaliknya, tidak ada budaya tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya.

Kota juga menjadi fokus perubahan sosial yang mengisi hadirnya aktivitas pribadi yang menyimpang. Tingkat kriminalitas, kenakalan remaja, dan aktivitas menyimpang

lainnya cukup tinggi di perkotaan. Jika sektor informal dapat menampung pekerja yang terpinggirkan, maka pemerintah kota tidak perlu membatasi mereka untuk mencari nafkah di sektor informal ini. Karena pada kenyataannya mereka tidak mampu terakomodasi di sektor formal karena keterbatasan yang ada pada masyarakat yang terpinggirkan (Daljoeni, 1997).

Kawasan permukiman liar ini merupakan kelanjutan dari kehidupan pedesaan yang fleksibel. Warga lebih gigih mempertahankan tanah yang sudah mereka tempati, sehingga sulit untuk melakukan penggusuran. Karakteristik sosial ekonomi penduduk liar yang tergolong terpinggirkan dan masyarakat termiskin terdiri dari kaum urbanis terkini. Tetapi mereka adalah penggerak kota karena mereka bekerja sebagai buruh bangunan, kuli angkut, dan buruh kasar yang menjaga perekonomian tetap berjalan.

Oleh karena itu, setiap penanganan permukiman kumuh harus secara sungguh-sungguh mengidentifikasi asal-usul tumbuh dan berkembangnya lingkungan permukiman dalam rangka membantu merekonstruksi nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berlaku di dalamnya, termasuk

hubungannya dengan konfigurasi tatanan sosial kota. struktur budaya.

6. Faktor Tata Ruang

Dalam konstelasi penataan ruang kota, permukiman kumuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan tata ruang kota. Oleh karena itu, penataan ruang kota perlu dilandasi dengan pemahaman bahwa pembangunan kota harus dilakukan sesuai dengan daya dukungnya, termasuk daya dukung kawasan kumuh yang relatif rendah.

Investasi yang salah dalam pemanfaatan ruang kota akan berdampak merusak lingkungan dan berpotensi mendorong tumbuhnya kawasan kumuh atau kawasan kumuh baru, bahkan dapat menghapus kawasan lama atau kelurahan yang memiliki nilai warisan budaya yang tinggi. yang kebetulan pada saat itu lingkungan telah memburuk atau memburuk.

7. Faktor Aksesibilitas

Secara umum, salah satu penyebab munculnya permukiman kumuh adalah terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap modal masyarakat. Modal komunitas ini

meliputi modal binaan, individu dan sosial serta lingkungan alam.

Modal terbangun meliputi informasi, jalan, sanitasi, drainase, jaringan listrik, ruang terbuka, perumahan, pasar, gedung pelayanan umum, sekolah dan sebagainya. Kapital individu, termasuk pendidikan, kesehatan, kemampuan dan keterampilan. Modal sosial antara lain meliputi konektivitas dalam suatu komunitas-cara manusia berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Dalam skala yang lebih luas, sekelompok orang membentuk organisasi, baik organisasi sukarela, bisnis melalui perusahaan atau pemerintah dan sebagainya, termasuk berbagai sistem sosial yang ada, termasuk kebijakan pembangunan perkotaan.

Sedangkan modal lingkungan alam meliputi sumber daya alam, jasa ekosistem dan estetika alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang diambil dari alam sebagai bagian dari bahan dasar yang digunakan untuk proses produksi. Jasa ekosistem meliputi kemampuan lahan untuk membudidayakan tumbuhan yang dapat menyediakan makanan, bahan sandang dan sebagainya.

8. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu dalam hal pencapaian pekerjaan dan pendapatan. Meski begitu, pendidikan sangat ditentukan oleh pendidikan itu sendiri dan kerja keras orang tua untuk dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Artinya, perbedaan latar belakang budaya dan sosial ekonomi (pendidikan dan pekerjaan) orang tua tidak hanya mempengaruhi pendidikan anak, tetapi juga untuk pekerjaan dan pendapatan mereka. Sedangkan faktor lain seperti: tempat tinggal, agama, status perkawinan dan status migrasi, serta usia memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap prestasi kerja dan pendapatan.

Banyak migran tidak dapat bekerja dengan standar tinggi. Sementara itu persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat tinggi dan semuanya dituntut dengan tingkat profesionalisme dan tingkat pendidikan yang harus mampu bersaing dengan yang lain.

Di sisi lain, kota-kota di Indonesia memiliki kelebihan jumlah tenaga kerja yang tidak dapat terdistribusi, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang tidak memiliki keterampilan dan keterampilan yang tinggi untuk dapat

bertahan hidup di jalur formal. Unsur penentu lainnya adalah tidak adanya kesempatan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Dampak dari akumulasi peristiwa tersebut menimbulkan tingkat pengangguran yang semakin meningkat setiap tahunnya.

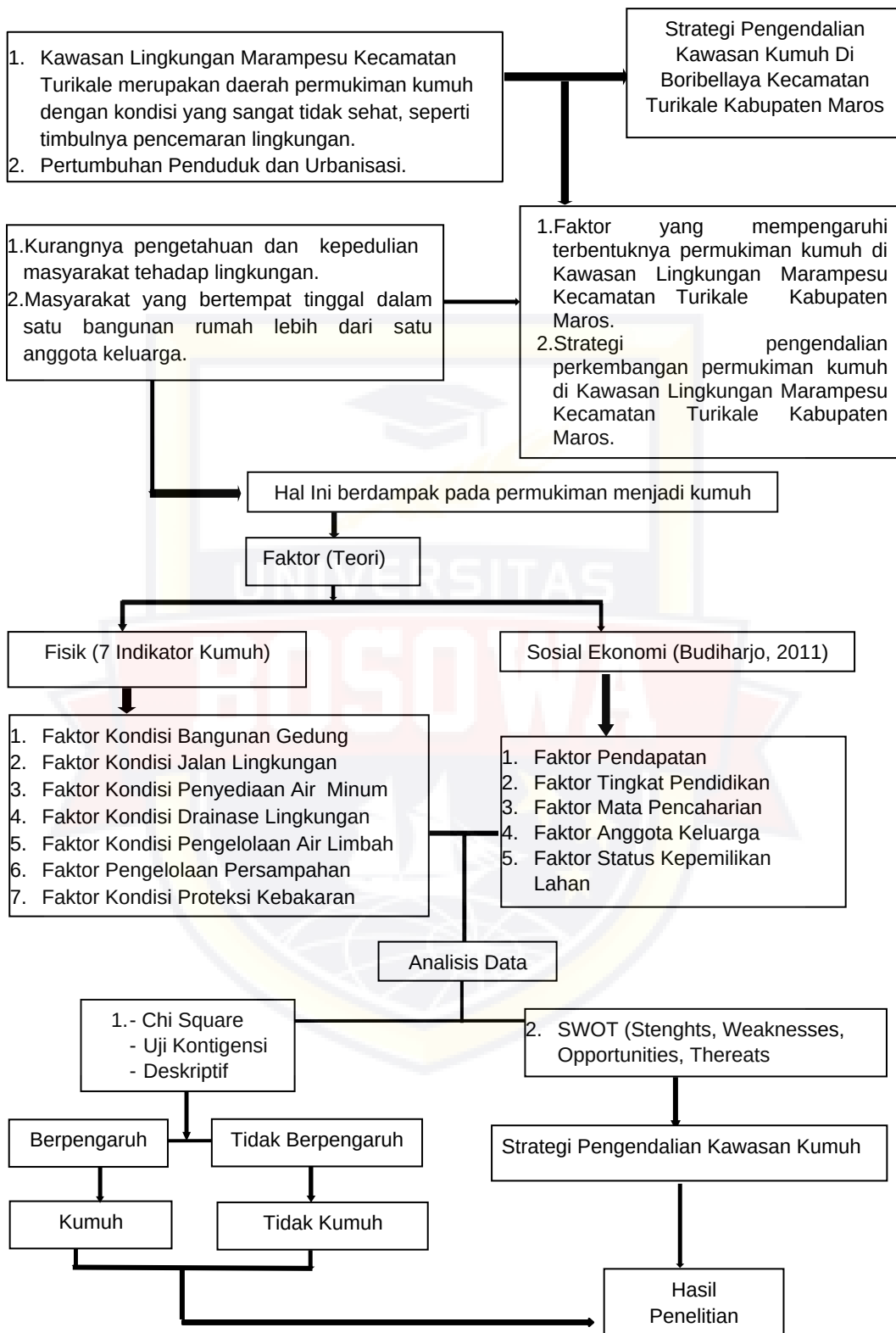
D. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan itu dengan segala macam faktor yang telah atau sudah diidentifikasi yakni sebagai masalah yang penting. (Sugiyono, 2010).

Perkembangan permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Marampesu ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, Menurut Budiharjo (2011), kondisi permukiman kumuh diperkotaan, banyak dipengaruhi oleh karakteristik fisik dan sosial yang ada pada masyarakat. Karakteristik fisik dan sosial yang diperkirakan berpengaruh terhadap permukiman kumuh perkotaan ini adalah : tingkat pendapatan, status kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga dan penilaian masyarakat terhadap lingkungan permukimannya. Faktor yang mempengaruhi terhadap kondisi permukiman kumuh adalah : faktor pendapatan, faktor tingkat pendidikan, faktor mata pencaharian, faktor anggota keluarga, dan faktor status kepemilikan lahan dan bangunan.

Maka studi penelitian ini bermaksud ingin melihat secara mendalam faktor apa yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh dan bagaimana strategi pengendalian perkembangan permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Marampesu Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.





Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian memiliki berbagai macam jenis bila dilihat dari landasan filsafat, data dan analisisnya, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kombinasi (mixed methods). Dalam melaksanakan penelitian ini di gunakan jenis metode pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif.

Menurut para ahli Metode Kuantitatif adalah metode survei dan eksperimen, (Creswell, 2009) Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk dapat melakukan pengukuran, peneliti melakukan kajian dari berbagai macam literatur yang terkait dengan hasil pengamatan langsung dilapangan yang di jabarkan kedalam beberapa komponen sub variabel/indikator.

Setiap sub variabel/indikator yang di tentukan dan di ukur melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel masyarakat asli dan masyarakat pendatang yang sudah menetap di Kelurahan Rapokalling yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survey untuk menentukan

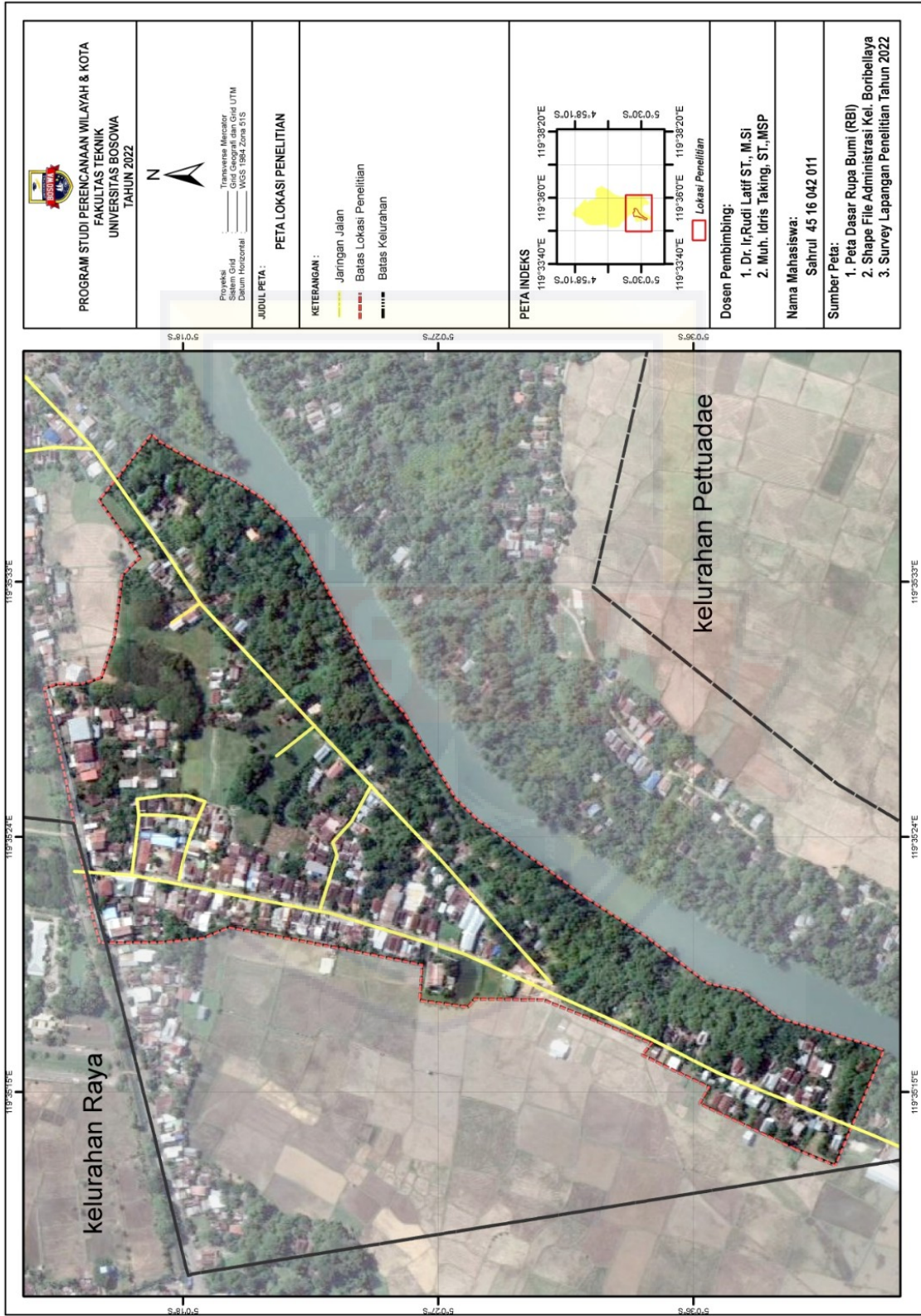
frekuensi dan presentase tanggapan mereka dengan memberikan angka yang berbeda-beda sesuai dengan sub variabel/indikator tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Lingkungan Marampesu Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Secara administrasi, Kawasan Lingkungan Marampesu termasuk dalam wilayah Kelurahan Boribellaya Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros yang terletak sekitar muara sungai Maros. Adapun lokasi penelitian di Kelurahan Boribellaya dengan luas wilayah 8,60 Km². Posisi geografis Kelurahan Boribellaya terletak di 4° 59' 29.44" S dan 119° 34' 38.08" E, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Allepolea, Mattiro Deceng
- Sebelah Selatan : Desa Bonto Tallasa, Kelurahan Pettuadae
- Sebelah Timur : Desa Alatengae, Desa Mattoangin dan
Desa Bonto Tallasa
- Sebelah Barat : Kelurahan Allepolea, Kelurahan Raya,
Kelurahan Pettuadae

Adapun luas kawasan penelitian yaitu 22,9 Ha. Berikut adalah peta lokasi penelitian di kawasan Lingkungan Marampesu Kelurahan Boribellaya :



Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian

C. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilakukan pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 20 November 2022

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian/Skirpsi

No	Agenda	Waktu															
		Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Sinopsis	■	■														
2.	Persiapan Berkas (SK)		■	■	■												
3.	Penyusunan Bab I,II, dan III			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
4.	Survey Pengambilan Data												■	■	■	■	
5.	Penyusunan Bab IV dan V															■	■
6.	Seminar Hasil																
7.	Seminar Tutup																

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang berada di Kawasan Lingkungan Marampesu Kelurahan Boribellaya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Etta Mamang Sangadji, 2010:177). Adapun metode pengambilan sampel digunakan dengan cara *multi stage sampling* yaitu sampel yang diambil dilakukan dengan cara mengkombinasikan beberapa metode diantaranya metode *sampling area*, *purposive sampling* dan *propotional sampling*.

Area Sampling, merupakan teknik yang digunakan bilamana populasi terdiri dari individu-individu, melainkan kelompok-kelompok individu, serta dapat dibedakan berdasarkan individu dalam suatu area. Penelitian ini sampel yang di ambil adalah masyarakat yang tinggal di Kawasan Lingkungan Marampesu Kelurahan Boribellaya.

Purposive Sampling, salah satu teknik sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri yang sesuai tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Jumlah sampel yang digunakan dalam melakukan penelitian ini disesuaikan dengan metode analisis yang digunakan yaitu *Chi-Square*. Jumlah sampel dibutuhkan paling sedikit 5 kali jumlah variabel indikator (Ferdinand, 2017). Adapun Jumlah indikator dalam penelitian ini sebanyak 14 indikator, $14 \times 5 = 70$. Jumlah sampel tersebut telah sesuai dengan prinsip matematis karena dalam pengujian *Chi-Square* sangat sensitif dengan jumlah sampel, sehingga sampel penelitian ini akan mengacu pada kriteria yang diusulkan oleh Hair er al. (2010:637) yaitu dengan teknik *Maximum Likelihood Estimation* (MLE). Jumlah sampel yang baik menurut MLE berkisar antara 100-200 sampel. Oleh karena itu jumlah sampel yang dibulatkan menjadi **100 sampel**.

E. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang ada dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan kualitatif, yaitu :

- a. Data Kuantitatif merupakan data berbentuk numerik atau angka. Data yang termasuk didalamnya.
- b. Data Kualitatif merupakan data non parametris yang menjelaskan secara deskripsi tentang data jenis kelamin, tingkatan Pendidikan dan jenis pekerjaan. Serta gambaran umum lokasi penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk sumber data yang diklasifikasikan kedalam sumber data primer dalam penelitian berdasarkan variabel.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini di peroleh secara langsung melalui Data sekunder yang berasal dari instansi yaitu BPS Kabupaten Maros dan Kantor Kecamatan maupun Kantor Kelurahan Boribellaya serta Library Research terutama melalui penelusuran buku-buku, laporan penelitian, naskah ilmiah, lainnya dan dari instansi terkait untuk memperoleh gambaran umum wilayah penelitian, serta data lainnya yang menyangkut dengan rumusan masalah.

F. Variabel Penelitian

Variabel adalah gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel dipakai dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Mengenai variabel penelitian yang digunakan dari hasil kajian pustaka yang dilakukan untuk

mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tumbuh kembangnya permukiman kumuh diantaranya :

- a. Faktor Pendapatan
- b. Faktor Tingkat Pendidikan
- c. Faktor Mata Pencaharian
- d. Faktor Anggota Keluarga
- e. Faktor Status Kepemilikan Lahan
- f. Faktor Kondisi Bangunan Gedung
- g. Faktor Kondisi Jalan Lingkungan
- h. Faktor Kondisi Penyediaan Air Minum
- i. Faktor Kondisi Drainase Lingkungan
- j. Faktor Kondisi Pengelolaan Limbah
- k. Faktor Pengelolaan Persampahan
- l. Faktor Kondisi Proteksi Kebakaran

G. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Analisis Chi-Square untuk melihat faktor determinan yang menggambarkan karakteristik faktor-faktor yang mempengaruhi dari variabel yang diteliti, kemudian untuk menyusun rumusan alternatif strategi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Marampesu menggunakan analisis faktor-faktor internal dan eksternal (IFE-EFE) dan matriks IE, serta analisis SWOT.

Tabel 3.2 Matriks Metode Analisis Data

No.	Rumusan Masalah	Jenis dan Sumber Data	Metode Analisis Data	Hasil yang Diharapkan
1.	<p>Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh di kawasan Lingkungan Marampesu Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.?</p>	<p>Data primer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Faktor Pendapatan ▪ Faktor Tingkat Pendidikan ▪ Faktor Mata Pencaharian ▪ Anggota Keluarga ▪ Faktor Status Kepemilikan Lahan ▪ Faktor Kondisi bangunan ▪ Faktor kondisi jalan lingkungan ▪ Faktor kondisi penyediaan air minum ▪ Faktor kondisi drainase lingkungan ▪ Faktor kondisi pengelolaan limbah ▪ Faktor pengelolaan persampahan ▪ Faktor kondisi proteksi kebakaran <p>Sumber data diperoleh dari hasil olahan data kuesioner</p>	<p>Analisis Chi-Square</p>	<p>Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh di Kawasan Lingkungan Marampesu Kecamatan Turikale Kabupaten Maros?</p>

2.	Bagaimana strategi pengendalian perkembangan permukiman kumuh di Lingkungan Marampesu Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.?	<ul style="list-style-type: none"> • Data Sekunder, yakni peta citra terkait dengan lokasi penelitian • Sumber diperoleh dari • SAS Planet 	Analisis SWOT	Strategi pengendalian terhadap perkembangan permukiman kumuh di Kawasan
----	--	---	---------------	---

1. Analisis *Chi-Square*

Chi-Square juga disebut sebagai Kih Kuadrat yaitu salah satu jenis uji komparatif non parametris dilakukan pada dua variabel dengan skala data kedua variabel ada nominal. Apabila ada dari 2 variabel, ada 1 variabel dengan dengan skala nominal maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus dilukan uji padat derajat terendah.

Analisis *Chi-Square* dilakukan untuk menguji pengaruh dua variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya (C = *Coefisien of Continngency*).

Untuk mengetahui frekuensi yang diharapkan (F_h) pada masing-masing frekuensi menurut baris dan kolom, jumlah masing-masing sub bagian dan jumlah keseluruhan. Dapat dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut:

$$F_h = i$$

F_h = Frekuensi yang diharapkan

n_{fb} = Jumlah frekuensi masing-masing baris

n_{fk} = Jumlah frekuensi masing-masing kolom

Analisis Chi-Square memiliki karakteristik :

- a. Nilai Chi-Square selalu positif.
- b. Terdapat beberapa keluarga distribusi Chis-Square, yaitu distribusi dengan $DK=1,2,3$ dan seterusnya.
- c. Bentuk distribusi Chi-Square adalah menjulur positif.

Adapun rumus dari analisis Chi-Square yaitu :

$$x^2 = i$$

Keterangan :

X^2 = Nilai Chi-Square

F_h = Frekuensi yang diharapkan

F_0 = Frekuensi yang diperoleh/diamati

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan apabila keadaan berikut dicapai, yakni : X^2 hitung $<$ X^2 tabel dimana H_0 diterima, sebaliknya apabila X^2 hitung $>$ X^2 tabel dimana H_0 ditolak atau H^1 . Untuk mengetahui koefisien korelasi setiap variabel X

terhadap Y berdasarkan hasil yang diperoleh, digunakan uji kontingensi yaitu :

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

Keterangan :

C : Hasil koefisien kontingensi

X^2 : Hasil Chi Kuadrat yang dihitung

N : Jumlah sampel

2. Skala Likert

Skala likert dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka metode pengukuran ini untuk melihat seberapa kuat variabel yang digunakan terhadap faktor yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh di kawasan lingkungan marampesu dengan menggunakan Skala Likert untuk mengetahui antara variabel X dan Y digunakan patokan interpresentase nilai. Dalam penelitian ini hasil analisis uji *Chi-Square* akan dicocokkan dengan sistem skoring dalam Skala Likert yang kemudian untuk menentukan korelasi variabel dengan tingkat pengaruhnya terhadap kecenderungan masyarakat untuk berhuni.

Tabel 3.3 Penentuan Skala Likert

Nilai	Pengaruh
-------	----------

0,80 – 1,00	Pengaruh sangat kuat
0,60 – 0,79	Pengaruh kuat
0,40 – 0,59	Pengaruh sedang
0,20 – 0,39	Pengaruh lemah
0,00 – 0,19	Pengaruh sangat lemah

Sumber : Maria M.I. 2000 dalam Arianti (2009:11)

3. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Effendu dan Singarimbun, 1989:4). Menurut Moleong (2007:3) mengemukakan bahwa analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati lapangan.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan kondisi eksisting permukaan kumuh di kawasan lingkungan marampesu, serta mendeskriptikan fakta, fenomena, dan keadaan yang diamati selama penelitian dilakukan terkait terbentuknya permukiman kumuh di Kawasan lingkungan marampesu.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data deskriptif kualitatif adalah :

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang kondisi eksisting di Kawasan lingkungan marampesu dengan wawancara, dan observasi langsung di lapangan.
- b. Mengidentifikasi masalah yang ada serta menganalisa secara mendalam dengan beberapa dampak kondisi eksisting di Kawasan lingkungan marampesu.
- c. Mendeskripsikan keadaan dan fakta dampak kondisi eksisting di Kawasan Lingkungan marampesu.

4. Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2009) proses penyusunan perencanaan strategis melalui tiga tahap, yakni tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan.

Sebelum dilakukan proses identifikasi, perlu disepakati terlebih dahulu basis analisis stakeholders yang berkaitan dengan pihak internal maupun eksternal. Dalam kajian ini, yang dikategorikan sebagai pihak internal ialah stakeholders Pemerintahan Kabupaten Maros dan masyarakat di lingkungan marampesu, sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah pusat, provinsi dan masyarakat atau pengusaha di luar Kabupaten Maros. Hal ini dilakukan sehingga dapat memudahkan dalam melakukan analisis faktor internal dan eksternal. Lebih jelasnya tahap-tahap perumusan strategi dalam kajian ini diuraikan sebagai berikut :

a. Pembuatan Personal SWOT Analisis

- 1) Tentukan indikator-indikator kekuatan, caranya adalah dengan mengidentifikasi semua indikator yang dapat kita kendalikan sendiri. Semua indikator yang mendukung tujuan kita merupakan indikator-indikator kekuatan. Sebaliknya, indikator yang menghambat atau mengganggu tujuan kita merupakan indikator kelemahan.
- 2) Tentukan indikator-indikator kelemahan yang kita miliki. Tujuan kita menentukan indikator ini ialah untuk meningkatkan kinerja kita. Dengan mengidentifikasi kelemahan.
- 3) Tentukan indikator-indikator peluang.
- 4) Menentukan indikator ancaman. Tentukan faktor-faktor apa saja yang dianggap dapat mengancam.

b. Model Penentuan Indikator Komponen SWOT

Penentuan indikator disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Selanjutnya lakukan evaluasi terhadap faktor internal, yaitu semua kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Penentuan indikator peluang dan ancaman disusun berdasarkan tujuan kita dalam membuat analisis SWOT.

INTERNAL	Kekuatan yang dimiliki	Kelemahan yang dimiliki
EKSTERNAL	Peluang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang	Ancaman yang memungkinkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlaksana

c. Evaluasi Faktor Internal (*IFE-Internal Factor Evaluation*)

Pada tahap pengumpulan data dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor strategis internal atau *Internal Factor Evaluation* (IFE) digunakan untuk mengetahui persepsi stakeholders terhadap faktor internal wilayah Kabupaten Maros dan masyarakat di Kawasan Lingkungan Marampesu berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Menurut Rangkuti (2009) terdapat lima langkah yang harus dilakukan untuk melakukan evaluasi faktor internal dengan menggunakan Matrix *Internal Factor Evaluation* (IFE), yaitu :

- 1) Setelah dilakukan identifikasi terhadap lingkungan internal, tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan.
- 2) Berikan bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting). Bobot yang diberikan pada suatu faktor menunjuka

kepentingan relatif dari faktor itu untuk sukses dalam usaha yang ditekuni lembaga. Tanpa mempedulikan apakah faktor kunci adalah kekuatan atau kelemahan internal, faktor-faktor yang dianggap mempunyai pengaruh terbesar pada prestasi organisasi diberi bobot tertinggi. Jumlah dari semua bobot tidak boleh melebihi 1,00.

- 3) Hitung rating atau peringkat masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai 1 (poor), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi wilayah atau lembaga untuk menunjukkan apakah faktor itu berpengaruh. Bila berpengaruh sangat kuat di beri nilai 4 dan bila berpengaruh kecil atau sangat lemah diberi nilai 1.
- 4) Kalikan bobot dengan rating/peringkat untuk memperoleh nilai terbobot.
- 5) Jumlah seluruh nilai yang terbobot untuk memperoleh total nilai yang terbobot.

Tabel 3.4 Matriks IFE (*Internal Factor Evaluation*)

No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
1	Kekuatan (<i>Strengths</i>):		1 - 4	
2			
3			
1	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>):		4 - 1	
2			
3			
Total		1,00		

Sumber : Rangkuti (2009)

d. Evaluasi Faktor Eksternal (*EFE-Eksternal Factor Evaluation*)

Pada tahap *External Factor Evaluation* (EFE) dilakukan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang diluar kendali pemerintah dan masyarakat di Kawasan Lingkungan Marampesu. Faktor eksternal berhubungan dengan persoalan ekonomi, sosial budaya, demografi, teknologi, hukum dan faktor lingkungan berupa lingkungan usaha industri, pasar, serta data eksternal relevan lainnya. Faktor eksternal berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap partisipasi masyarakat. Hasil analisis eksternal digunakan untuk mengetahui peluang dan

ancaman yang ada serta seberapa baik strategi yang telah dilakukan selama ini. Menurut Rangkuti (2009), terdapat lima langkah yang harus dilakukan untuk mengevaluasi faktor eksternal ini dengan menggunakan Matriks *Eksternal Factor Evaluation* (EFE), yaitu :

- 1) Setelah dilakukan identifikasi terhadap lingkungan eksternal, tentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman.
- 2) Beri bobot masing-masing faktor, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai 0,0 (tidak penting). Jumlah seluruh bobot yang diberikan tidak boleh melebihi nilai atau skor 1.
- 3) Hitung atau berikan rating/peringkat 1 sampai 4 pada setiap faktor kunci untuk menunjukkan seberapa besar atau kecil pengaruh peluang dan ancaman, jika ancamannya sangat besar/kuat, ratingnya 1 dan sebaliknya jika ancamannya sedikit atau kecil/lemah ratingnya 4.
- 4) Kalikan bobot dengan rating/peringkat untuk memperoleh nilai terbobot. Jika hasil yang diperoleh adalah 1 berarti situasi eksternal sangat tidak baik atau tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada serta tidak mampu mengatasi ancaman yang ada, bila

diperoleh nilai 4 berarti situasi eksternal sangat baik, mampu memanfaatkan peluang yang ada dan mampu mengatasi atau mengurangi ancaman.

- 5) Jumlahkan nilai yang terbobot untuk mendapatkan total nilai bobot.

Tabel 3.5 Matriks EFE (Eksternal Factor Evalaution)

No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
	Peluang (<i>Opportunities</i>):			
1			
2		1 - 4	
3			
	Ancanaman (<i>Threats</i>):			
1			
2		4 - 1	
3			
	Total	1,00		

Sumber : Rangkuti (2009)

e. Analisis SWOT (*Strenghts-Weaknesses-Opportinities-Threats*)

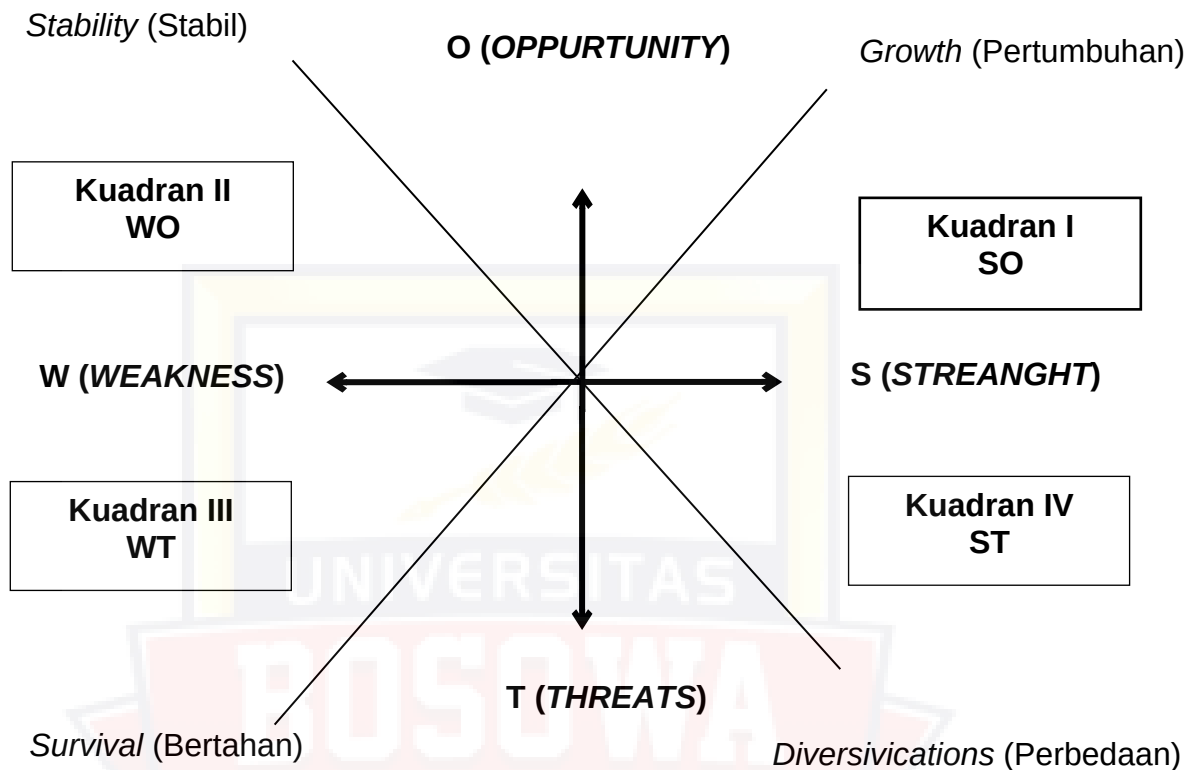
Analisis SWOT merupakan alata untuk memaksimalkan peranan faktor yang bersifat positif, meminimalisasi kelemahan yang terdapat pada pertisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan di Kawasan Marampesu serta menekan dampak ancaman

yang timbul. Hasil dari analisis SWOT adalah berupa sebuah matriks yang terdiri dari empat kuadran. Masing-masing kuadran merupakan perpaduan startegi antara faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Matriks SWOT yang digunakan dalam kajian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Matriks Analisis SWOT

Faktor Internal	Kekuatan (S) 1. Daftar Kekuatan 2.	Kelemahan (W) 1. Daftar Kelemahan 2.
Faktor Eksternal		
Peluang (O) 1. Daftar Peluang 2.	Strategi S-O	Strategi W-O
Ancaman (T) 1. Daftar Ancaman 2.	Strategi S-T	Strategi W-T

Sumber : Rangkuti (2009)



Gambar 3.2 Kuadran SWOT

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian untuk dijadikan acuan. Adapun diantaranya sebagai berikut :

- a. Faktor Pendapatan, dalam hal ini dimaksud ialah pendapatan masyarakat dilokasi pnenlitan telah memenuhi standar upah minimum regional atau tidak.

- b. Faktor Tingkat Pendidikan, dalam hal ini dimaksud ialah tingkat pendidikan dilokasi penelitian telah menyelesaikan pendidikan minimum SMA/Sederajat.
- c. Faktor Mata Pencaharian, adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk menjalankan roda perekonomian di dalam suatu keluarga telah terpenuhi dengan tidak adanya anggota keluarga yang tidak memiliki pekerjaan.
- d. Faktor Anggota Keluarga, dalam hal ini adalah keseluruhan anggota keluarga yang mendiami suatu bangunan rumah lebih dari satu kartu keluarga.
- e. Faktor Status Kepemilikan Lahan, dalam hal ini adalah status kepemilikan lahan rumah yang didiami oleh anggota keluarga merupakan tanah sendiri, sewa ataupun tanah pemerintah.
- f. Faktor kondisi bangunan Gedung, dalam hal ini dimaksud ialah kondisi bangunan bermukim masyarakat telah memenuhi standar kelayakan.
- g. Faktor kondisi jalan lingkungan, dalam hal ini dimaksud jalan yang menjadi prasarana pendukung masyarakat telah memenuhi standar lebar jalan atau ketersediaan jalan di lokasi penelitian.
- h. Faktor Kondisi penyediaan air minum, dalam hal ini dimaksud ialah masyarakat setempat telah memperoleh ketersediaan air minum yang cukup atau telah terpenuhi.

- i. Faktor kondisi drainase lingkungan, dalam hal ini ialah untuk mengairkan aliran pembuangan limbah ataupun air hujan yang turun di suatu wilayah terpenuhi sesuai standar.
- j. Faktor kondisi pengelolaan limbah, dalam hal ini ialah pengelolaan limbah rumah tangga telah dikelola dengan baik mengarah ke pembuangan yang sesuai standar teknis.
- k. Faktor pengelolaan persampahan, dalam hal ini ialah pengelolaan sampah memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
- l. Faktor kondisi proteksi kebakaran, dalam menjaga kebencanaan didalam suatu wilayah permukiman penyediaan proteksi kebakaran harus terpenuhi baik sarana maupun prasarana.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A Gambaran Umum

Secara administrasi lokasi penelitian ini dilakukan pada Kawasan Lingkungan Boribellaya, yang berada pada Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, untuk lebih jelasnya seperti penjelasan berikut :

1. Gambaran Umum Kabupaten Maros

a. Letak Geografis dan Administratif

Kabupaten Maros memiliki luas wilayah Kabupaten Maros 1.619,12 km² yang terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara 40°45'-50°07' Lintang Selatan dan 109°205'-129°12' Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Maros memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Secara administrasi pemerintahnya terdiri dari 14 Kecamatan, yaitu Kecamatan Mandai, Moncongloe, Maros Baru, Marusu, Turikale, Lau, Bontoa, Bantimurung, Simbang, Tanralili, Tompobulu, Camba, Cenrana dan Kecamatan Mallawa. Jumlah Kelurahan di Kabupaten Maros sebanyak 103 Desa/Kelurahan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, 2022).

Kecamatan terluas berada di Kecamatan Tompobulu dengan 287,66 Km² dari luas Kabupaten Maros. Sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Turikale dengan 29,93 Km² dari luas Kabupaten Maros. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persen (%)
1.	Mandai	4	3
2.	Moncongloe	4	2
3.	Maros Baru	5	3
4.	Marus	5	3
5.	Turikale	2	1
6.	Lau	7	4
7.	Bontoa	9	5
8.	Bantimurung	17	1
9.	Simbang	10	6
10.	Tanralili	8	5
11.	Tompobulu	28	1
12.	Camba	14	8

13.	Cenrana	18	1
14.	Mallawa	23	1
Jumlah Total		1.619,12	10

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka, Tahun 2022

b. Kondisi Topografi dan Kelerengan

Kabupaten Maros terdiri dari daerah pantai dan daerah bukan pantai. Berdasarkan data hasil penelitian Laporan Geologi Terpadu Kabupaten Maros, pada peta rupabumi dengan skala 1:50.000 (Surwanda Wijaya, dkk 1994) dapat diklasifikasikan pengelompokan sudut lereng yang terdapat di Kabupaten Maros, yaitu sebagai berikut :

- 1) Wilayah Sudut Lereng <3% sebaran : Lau, Bontoa, Turikale, Maros Baru, Marusu, Mandai, Bantimurung, Camba dan Tanralili
- 2) Wilayah Sudut Lereng 3-5% sebaran : Mallawa, Camba, Bantimurung, Bontoa dan Tanralili
- 3) Wilayah Sudut Lereng 5-10% sebaran : Mallawa, Camba, Tanralili, Tompobulu dan Bantimurung
- 4) Wilayah Sudut Lereng 10-15% sebaran : Mallawa, Camba, Bantimurung, Bontoa, Simbang, Tanralili dan Tompobulu
- 5) Wilayah Sudut Lereng 30-70% Sebaran : Mallawa, Camba, Bantimurung, Simbang dan Bontoa

- 6) Wilayah Sudut Lereng $>70\%$ sebaran : Mallawa, Camba, Bantimurung, Simbang, Tompobulu dan Tanralili.

c. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

Hasil penelitian terdahulu berupa Pemetaan Geologi Lapangan dalam Sekala 1:250.000 yang dilakukan oleh Rab. Sukanto dan Supriatna 1982 berupa peta Geologi Lembar Ujung Pandang, Benteng dan Sinjai diperoleh bahwa sifat fisik, tekstur, atau ukuran butir, serta genesa dan batuan penyusunnya maka jenis tanah di kabupaten Maros diklasifikasikan dalam: 4 (empat) tipe:

- 1) Alluvial Muda merupakan endapan aluvium (endapan aluvial sungai, pantai dan rawa) yang berumur kuartar (resen) dan menempati daerah morfologi pedataran dengan ketinggian 0-60 m dengan sudut kemiringan lereng $<3\%$. Tekstur beraneka mulai dari ukuran lempung, lanau, pasir, lumpur, kerikil, hingga kerakal, dengan tingkat kesuburan yang tinggi, luas penyebarannya sekitar 14,20% (229,91 km²) dari luas Kabupaten Maros, meliputi Kecamatan Lau, Bontoa, Turikale, Maros Baru, Moncongloe, Marusu,

Mandai, Bantimurung, Camba, Tanralili dan Tompobulu.

2) Regosol adalah tanah hasil lapukan dari batuan gunungapi dan menempati daerah perbukitn vulkanik, dengan ketinggian 110-1.540m dengan sudut kemiringan lereng >15%. Sifat-sifat fisiknya berwarna coklat hingga kemerahan, berukuran lempung lanauan – pasir lempungan, plastisitas sedang, agak padu, tebal 0,1-2,0 m. Luas penyebarannya sekitar 26,50% (429,06 km²) dari luas kabupaten Maros meliputi kecamatan Cenrana, Camba, Mallawa dan Tompobulu.

3) Litosol merupakan tanah mineral hasil pelapukan batuan induk, berupa batuan beku (intrusi) dan/atau batuan sedimen yang menempati daerah perbukitan intrusi dengan ketinggian 3-1.150 m dan sudut lereng < 70%. Kenampakan sifat fisik berwarna coklat kemerahan, berukuran lempung, lempung lanauan, hingga pasir lempungan, plastisitas sedang-tinggi, agak padu, solum dangkal, tebal 0,2-4,5 m. Luas penyebarannya sekitar 37,60 % (608,79 km²) dari luas kabupaten Maros, meliputi kecamatan Mallawa,

Camba, Bantimurung, Cenrana, Simbang, Tompobulu, Tanralili dan Mandai.

- 4) Mediteran merupakan tanah yang berasal dari pelapukan batugamping yang menempati daerah perbukitan karst, dengan ketinggian 8-750 m dan sudut lereng > 70%. Kenampakan fisik yang terlihat berwarna coklat kehitaman, berukuran lempung pasiran, plastisitas sedang-tinggi, agak padu, permeabilitas sedang, rentan erosi, tebal 0,1-1,5 m.

Luas penyebarannya sekitar 21,70% (351,35 km²) dari luas kabupaten Maros, meliputi kecamatan Mallawa, Camba, Bantimurung, Bontoa, Simbang, Tompobulu dan Tanralili.

Tabel 4.2
Klasifikasi Jenis Tanah di Kabupaten Maros

Jenis	Litologi Batuan	Luas	Sebaran (kecamatan)
Alluvial Muda	Endapan Alluvial	14,20% (229,91)	Lau, Bontoa, Turikale, Maros Baru, Moncongloe, Marusu, Mandai, Camba, Bantimurung, Tanralili,
Regosol	Batuan vulkanik dan lapukan gunung api	26,50% (429,06)	Cenrana, Camba, Mallawa, Tompobulu

Litosol	Batuan beku/sedimen dan lapukannya	37,60% (608,79)	Mallawa, Camba, Bantimurung, Cenrana, Simbang, Mandai, Tompobulu, Tanralili
Mediteran	Batu Gamping dan lapukan	21,70% (351,35)	Mallawa, Camba, Bantimurung, Bontoa, Simbang, Tompobulu, Tanralili

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros, 2009

d. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Maros termasuk daerah yang beriklim tropis, karena letaknya yang dekat dengan khatulistiwa dengan kelembaban berkisar antara 69-88. Temperatur udara rata-rata 27.2 C. Kecepatan angin rata-rata 3-4 knot/jam. curah hujan tahunan rata-rata 291 mm/thn dengan rata-rata hari hujan sekitar 17 hari.

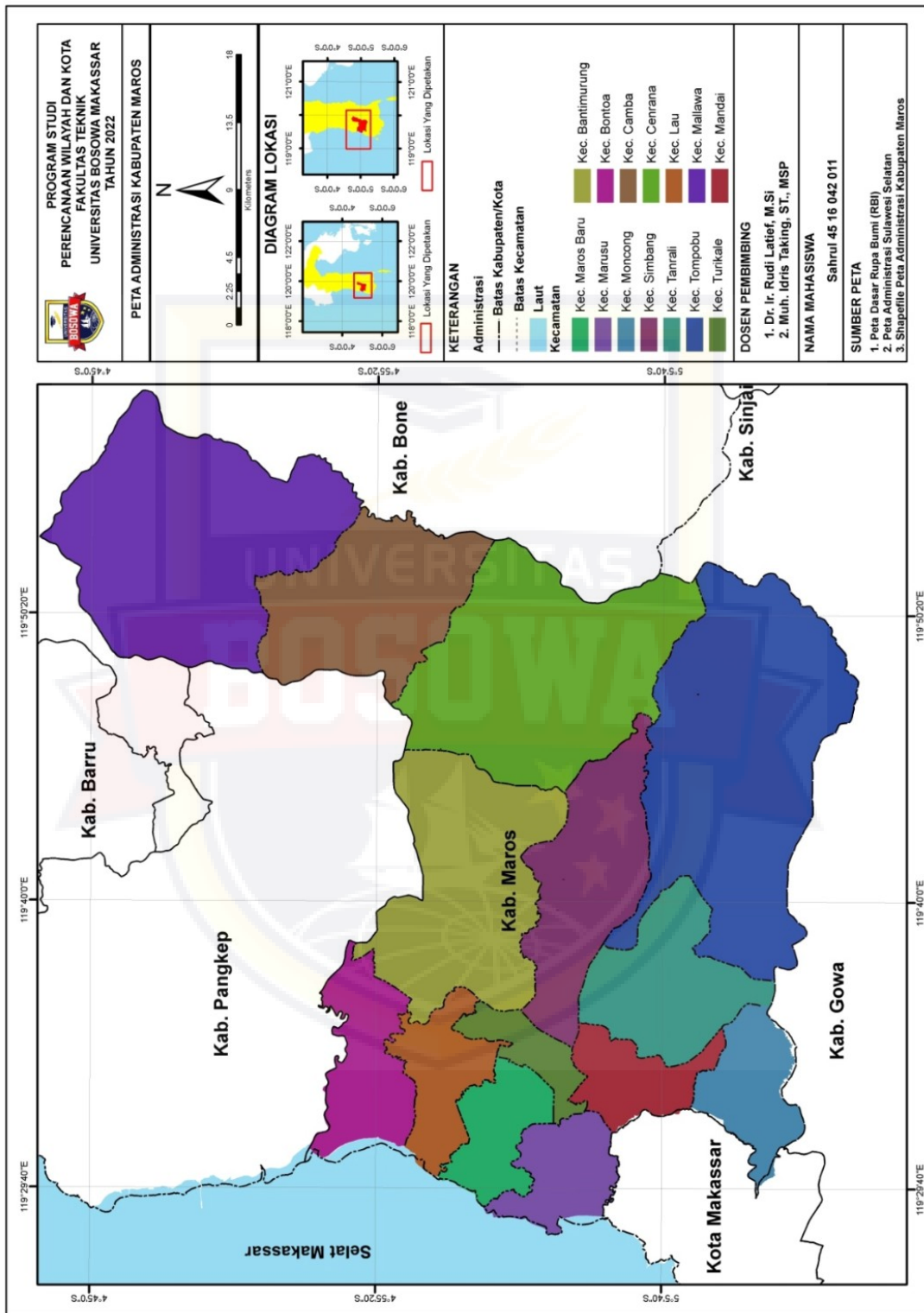
Daerah Kabupaten Maros pada dasarnya beriklim tropis dengan dua musim. Menurut Oldment, tipe iklim di Kabupaten Maros adalah tipe C2 yaitu bulan basah (200 mm) selama 2 – 3 bulan berturut-turut dan bulan kering (100 mm) selama 2 – 3 bulan berturut-turut.

e. Kondisi Hidrologi

Keadaan hidrologi wilayah Kabupaten Maros dibedakan menurut jenisnya adalah air permukaan (sungai, rawa dan sebagainya) dan air dibawah permukaan (air

tanah). Air dibawah permukaan yang merupakan air tanah merupakan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari masyarakat, sumur dangkal dapat diperoleh dengan tingkat kedalaman rata-rata 10 sampai 15 meter, sedangkan sumur dalam yang diperoleh melalui pengeboran dengan kedalaman antara 75-100 meter.

Sumber air permukaan di wilayah Kabupaten Maros berupa beberapa sungai yang tersebar di beberapa kecamatan, dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga dan kegiatan pertanian. Sungai tersebut yakni sungai Anak Sungai Maros, Parangpakku, Marusu, Pute, Borongkalu, Batu Pute, Matturungeng, Marana, Campaya, Patunuengasue, Bontotanga dan Tanralili. Jenis air ini sebagian di pergunakan untuk petani.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Maros

2. Gambaran Umum Kecamatan

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Boribellaya, bertempat di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Kecamatan Turikale merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Maros. Dari tujuh daerah wilayah administrasi yang ada, mempunyai topografi daratan rendah dengan ketinggian rata-rata 0-20 meter di atas permukaan laut.

a. Letak Geografis dan Administratif

Kecamatan Turikale merupakan daerah bukan pantai yang Sebagian besar berbentuk daratan, dengan luas wilayah sekitar 29,93 Km² dan Kecamatan Turikale merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Maros. Adapun batas administrasi Kecamatan Turikale sebagai berikut :

- Sebelah utara :Kecamatan Lau
- Sebelah Timur : Kecamatan Bantimurung dan Simbang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mandai
- Sebelah Barat : Kecamatan Maros Baru

Secara administrasi pemerintahnya terdiri 7 Kelurahan, yaitu Kelurahan Taroda, Adatongeng, Pettuadae, Boribellaya, Raya, Turikale, dan Kelurahan Alliritengae (Kecamatan Turikale Dalam Angka , 2021).

Kelurahan terluas berada di Kelurahan Boribellaya dengan 8,6 km² dari luas Kecamatan Turikale. Sedangkan wilayah terkecil adalah Kelurahan Alliritengae dengan 1,73 Km² dari luas Kecamatan Turikale. Menurut jaraknya, ibu kota kecamatan dengan ibu kota Kabupaten berkisar 1 km. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Luas Wilayah dan Jarak Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Turikale Tahun 2022

No.	Nama Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Jarak dari Ibukota (Km)	
			Kabupaten	Kecamatan
1	Taroadada	7,06	2	3
2	Adatongeng	3,09	1	2
3	Pettuadae	4,68	0	0,5
4	Boribellaya	8,6	3	2
5	Raya	2,06	2	1
6	Turikale	2,71	1	0
7	Alliritengae	1,73	0	0,5
Jumlah Total		29,93	-	

Sumber : Kecamatan Turikale Dalam Angka, Tahun 2021

b. Kondisi Topografi

Berdasarkan data Topografi, Kecamatan Turikale mempunyai topografi daratan rendah dengan ketinggian rata-rata 0-20 meter di atas permukaan laut.

c. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

Hasil penelitian terdahulu berupa Pemetaan Geologi Lapangan dalam Sekala 1:250.000 yang dilakukan oleh Rab. Sukanto dan Supriatna 1982 berupa peta Geologi Lembar Ujung Pandang, Benteng dan Sinjai diperoleh bahwa sifat fisik, tekstur, atau ukuran butir, serta genesa dan batuan penyusunnya maka jenis tanah di kabupaten Maros diklasifikasikan dalam: 4 (empat) tipe, terdapat 1 tipe yang termasuk di Kecamatan Turikale yaitu:

- 1) Alluvial Muda merupakan endapan aluvium (endapan aluvial sungai, pantai dan rawa) yang berumur kuartar (resen) dan menempati daerah morfologi pedataran dengan ketinggian 0-60 m dengan sudut kemiringan lereng <3%. Tekstur beraneka mulai dari ukuran lempung, lanau, pasir, lumpur, kerikil, hingga kerakal, dengan tingkat kesuburan yang tinggi, luas penyebarannya sekitar 14,20% (229,91 km²) dari luas Kabupaten Maros, meliputi Kecamatan Lau,

Bontoa, Turikale, Maros Baru Moncongloe, Marusu, Mandai, Bantimurung, Camba, Tanralili dan Tompobulu.

d. Aspek Kependudukan

1) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Komposisi ini untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam satu wilayah.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan sex ratio menurut kelurahan di Kecamatan Turikale yaitu:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut dan Jenis Kelamin di Kecamatan Turikale Tahun 2022

No.	Nama Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
1	Taroadaa	5.578	5.407	10.985
2	Adatongeng	3.724	3.820	7.544
3	Pettuadae	4.397	4.430	8.827
4	Boribellaya	2.491	2.506	4.997
5	Raya	2.357	2.363	4.720

6	Turikale	3.470	3.464	6.93
7	Alliritengae	2.261	2.290	4.55
	Jumlah Total	24.278	24.280	48.5

Sumber : Kecamatan Turikale Dalam Angka, Tahun 2021

Berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Turikale menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak adalah Kelurahan Taroda 10.985 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 5.578 jiwa dan perempuan 5.407 jiwa. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kelurahan Alliritengae yaitu 4.551 Jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 2.261 jiwa dan perempuan 2.290 jiwa.

2) Distribusi dan Kepadatan Penduduk

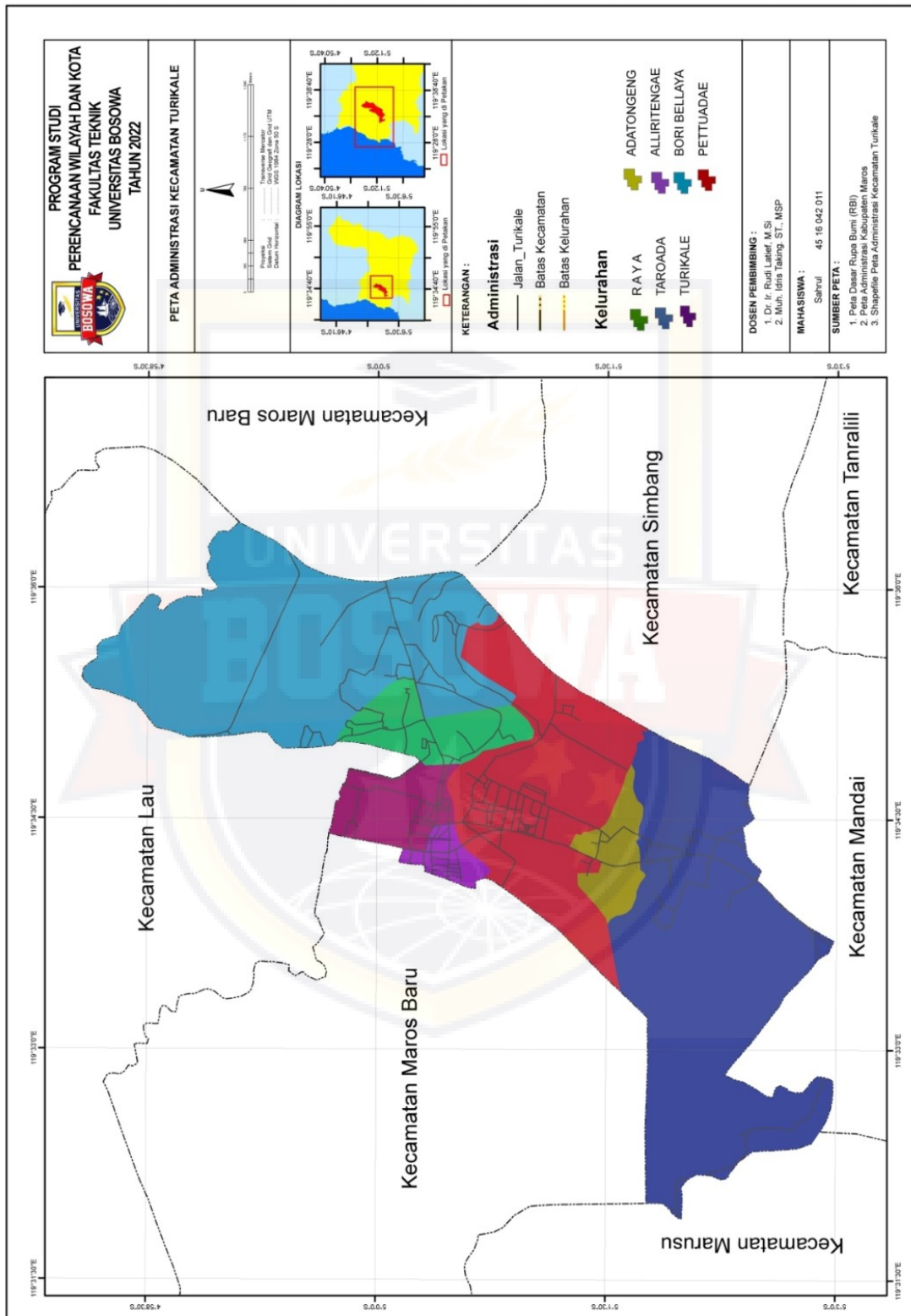
Persebaran penduduk dan kepadatan penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak hal ini menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap km² suatu wilayah. Adapun jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kecamatan Turikale , untuk lebih jelasnya lihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.5 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut
Kelurahan di Kecamatan Turikale Tahun 2022**

No.	Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Daerah (Km²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)
1.	Taroadada	10.985	7,06	1.555
2.	Adatongeng	7.544	3,09	2.441
3.	Pettuadae	8.827	4,68	1.886
4.	Boribellaya	4.997	8,6	581
5.	Raya	4.720	2,06	2.291
6.	Turikale	6.934	2,71	2.558
7.	Alliritengae	4.551	1,73	2.630
Jumlah		48.558	29,93	13.942

Sumber : Kecamatan Turikale Dalam Angka, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diketahui jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kelurahan Taroadada dengan jumlah 10.985 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kelurahan Alliritengae dengan jumlah 4.551 jiwa. Adapun kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kelurahan Alliritengae dengan jumlah kepadatan 2.630 Jiwa/Km² dan yang terendah di Kelurahan Boribellaya dengan jumlah kepadatan 581 Jiwa/Km².



Gambar 4.2 Peta Administrasi Kecamatan Turikale

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Kumuh Boribellaya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Secara administrasi, Kawasan Kumuh Boribellaya termasuk dalam wilayah Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros yang terletak sekitar muara sungai Maros. Adapun lokasi penelitian di Kelurahan Boribellaya dengan luas wilayah 8,60 Ha. Posisi geografis Kelurahan Boribellaya terletak di $4^{\circ} 59' 29.44''$ S dan $119^{\circ} 34' 38.08''$ E, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Desa Bonto Tallasa, Kelurahan Pettuade
- Sebelah Utara : Kelurahan Allepolea, Mattiro Deceng
- Sebelah Timur : Desa Alatengae, Desa Mattoangin dan Desa Bonto Tallasa
- Sebelah Barat : Kelurahan Allepolea, Kelurahan Raya, Kelurahan Pettuadae

Luas kawasan penelitian di kawasan lingkungan marampesu yaitu 22,9 Ha. Jumlah penduduk Kawasan Lingkungan Marampesu

a. Profil Dan Karakteristik Responden

1) Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat yang dijadikan responden di Kawasan Lingkungan Marampesu merupakan RW 01 RT 01,02 dan 03 yang bermata pencaharian buru harian, pedagang atau wiraswasta, dan IRT. Masyarakat yang mewakili masing-masing dari rumah tangga, umur 18 tahun ke atas, dan masa tiggal lebih dari 5 tahun ke atas, rata-rata riwayat pendidikan masyarakat setempat SD-SMA.

2) Kondisi Ekonomi

Masyarakat dilokasi penelitian ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi harian, ada yang menjadi buruh harian, pedagang di pasar tradisional yang tidak jauh dari lokasi penelitian atau wiraswasta dan juga karyawan satuan pengaman.

3) Fisik Hunian

Kondisi fisik hunian masyarakat dilokasi penelitian ialah memiliki kepadatn bangunan yang cukup tinggi dan kondisi bangunan antara lain kondisi lantai, dinding, dan atapnya tidak layak huni (rusak).

B Analisis Faktor Penyebab Terbentuknya Permukiman Kumuh

a. Analisis Deskriptif

1) Kondisi Bangunan Gedung

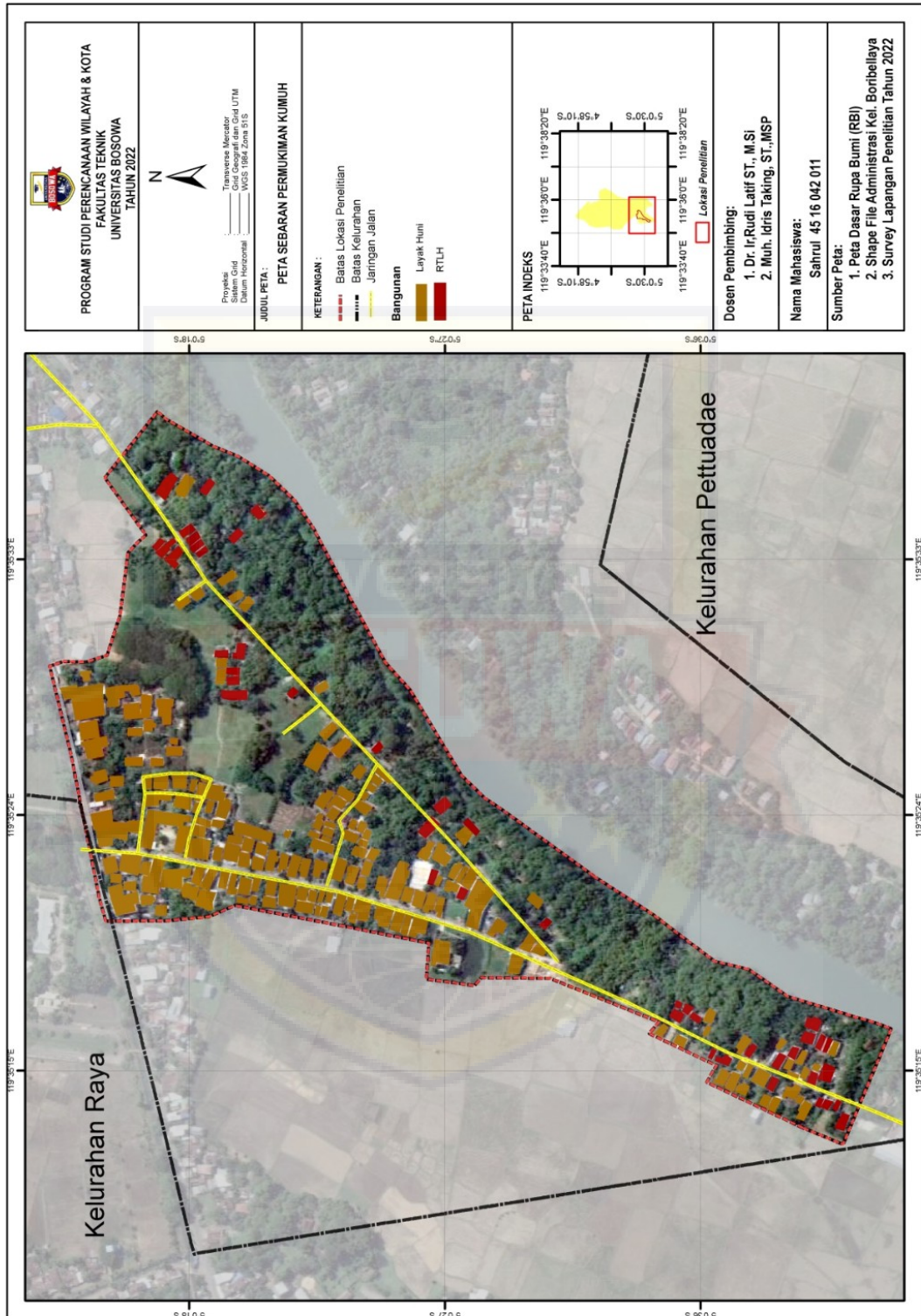
Menurut UU 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Menyatakan Bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan RW 01 RT 01,02 dan 03 kondisi bangunan gedung di kawasan lingkungan marampesu memiliki ketidakteraturan bangunan yang memiliki permasalahan pada kondisi atap yang masih ada beberapa rumah yang kurang layak, apabila turun hujan dapat membasahi dalam rumah. Kondisi dinding yang masih adanya beberapa rumah yang menggunakan dinding dari dinding semi permanen dari atap bekas. Begitupun dengan kondisi lantai yang beberapa rumah masih menggunakan lantai dasar yang membuat tingkat kenyamanan kurang. Sedangkan sarana dan prasarana pendukung dilokasi penelitian masih belum memenuhi syarat standar sarana prasarana.

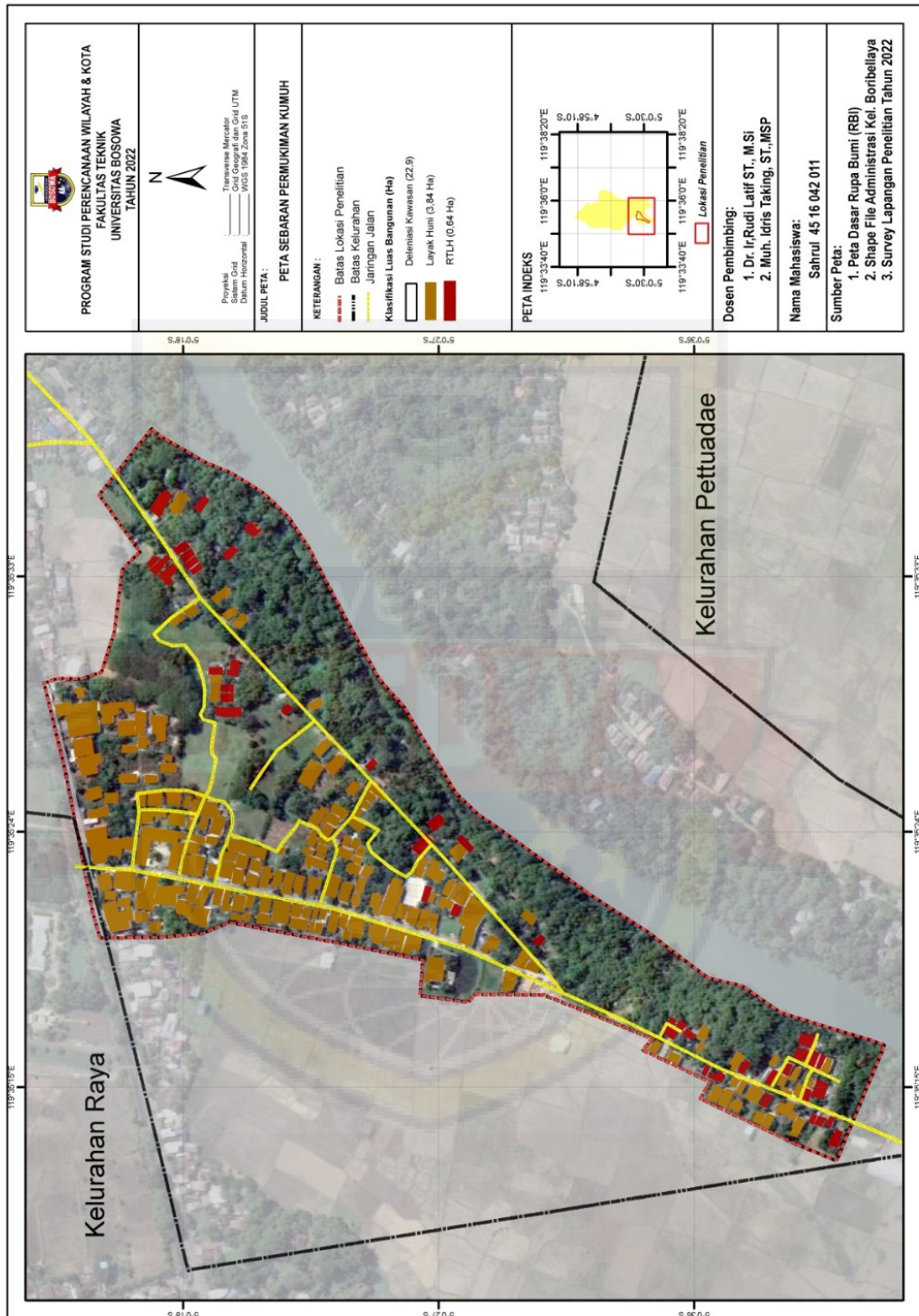
Berikut adalah visualisasi bangunan gedung dan juga peta sebaran permukiman kumuh di kawasan lingkungan Marampesu.



**Gambar 4.3 Visualisasi Bangunan
di Kawasan Lingkungan Marampesu**
(Sumber : Hasil Survei Lapangan 2022)



Gambar 4.4 Peta Sebaran Permukiman Kumuh



Gambar 4.5 Peta Sebaran Permukiman Kumuh Berdasarkan Luasan (Ha)

2) Kondisi Jalan Lingkungan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Pasal 16 Tahun 2006 Tentang Jalan menyatakan bahwa jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (Enam koma lima) meter. Persyaratan teknis jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter.

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung dilapangan kondisi jalan lingkungan masih belum memenuhi minimum lebar badan jalan 6,5 meter sehingga apabila dalam keadaan mendesak membuat mobil ambulans tidak bisa menjemput masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan kondisi spesifikasi di lapangan masih cukup banyak menggunakan jalan tanah, sedangkan paving blok hanya beberapa ruas dalam keadaan baik, selebih paving blok dalam keadaan buruk. Jaringan jalan merupakan prasarana penghubung antara wilayah atau kawasan, oleh karena itu di butuhkan sasaran rencana dengan ketentuan standar kebutuhan pelayanan yang berlaku. Berikut adalah jaringan jalan dan peta sebaran kondisi dan klasifikasi jalan di kawasan lingkungan Marampesu.



**Gambar 4.6 Visualisasi Jaringan Jalan
Di Kawasan Lingkungan Marampesu**

(sumber : Hasil Survei lapangan, 2022)

3) Kondisi Penyediaan Air Minum

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Pasal 5 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyatakan tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan kondisi penyediaan air minum masih belum terpenuhi secara kuantitas dan kualitas, seperti yang kita ketahui air minum/bersih merupakan suatu kebutuhan pokok di kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara oleh masyarakat sumber air yang digunakan lebih dominan masih menggunakan sumur dan untuk pengguna air PDAM masih jarang menggunakan, sehingga masih banyak masyarakat bergantung pada air galon isi ulang untuk air minum Air bersih menjadi syarat mutlak yang harus tersedia di setiap wilayah untuk mendukung seluruh aktivitas masyarakat karena air bersih adalah kebutuhan pokok setiap individu guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Berikut adalah visualisasi air bersih dilingkungan marampesu.



**Gambar 4.7 Visualisasi Air bersih di
Kawasan Lingkungan Marampesu**

(Sumber : Hasil Survei Lapangan, 2022)

4) Kondisi Drainase Lingkungan

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menyatakan sarana drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran hujan

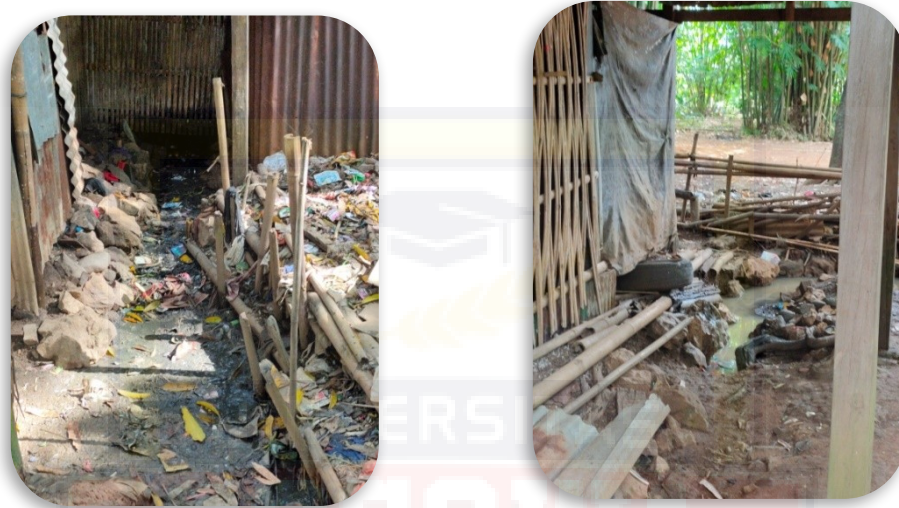
agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan kondisi Drainase lingkungan dilokasi penelitian masih kurang terpenuhi karena tidak terdapat satupun drainase dikawasan penelitian.

5) Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik menyatakan air limbah domestik adalah air yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sistem pengelolaan air limbah domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan saran pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan hasil obsersasi langsung dilapangan kondisi pengelolaan air limbah tidak terdapat satupun dan pembuangan air limbah tiap rumah seringkali menumpuk dipekarangan rumah

sehingga terjadinya permukiman terlihat kumuh. Berikut adalah visualisasi air limbah domestik di kawasan marampesu.



**Gambar 4.8 Visualisasi Air Limbah
Di Kawasan Lingkungan Marampesu**

(Sumber : Hasil Survei Lapangan, 2022)

6) Pengelolaan Persampahan

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sarana persampahan adalah peralatan yang dapat digunakan dalam kegiatan penanganan sampah, sedangkan

prasarana adalah fasilitas dasar yang menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung dilapangan kondisi pengelolaan persampahan cenderung kurang maksimal dalam pengelolaannya, sarana persampahan dikawasan lingkungan marampesu masih kurang terpenuhi dikarenakan akses jalan yang sulit di lalui oleh kendaraan sampah baik mobil ataupun fukuda akibatnya pengelolaan persampahan di masyarakat menjadi kumuh dan kurang dikelola dengan baik, didukung dengan prasarana persampahan dilokasi penelitian juga tidak terpenuhi seperti tidak adanya tempat penampungan sementara (TPS) yang layak untuk pengelolaan sampah.

Akibatnya sarana dan prasaran persampahan yang cenderung tidak terpenuhi membuat masyarakat dilokasi penelitian melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara di bakar tiap hari bahkan sebagian lainnya membuang sampah di pinggiran sungai.



**Gambar 4.9 Visualisasi Sistem Persampahan
Di kawasan Lingkungan Marampesu**

(Sumber : Hasil Survei Lapangan, 2022)

7) Kondisi proteksi kebakaran

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan Menyatakan manajemen proteksi kebakaran diperkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, serta meminimalisasikan dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota. Adapaun sarana dan prasarana dalam proteksi kebakaran antara lain ialah, pasokan air untuk

pemadam kebakaran (diperoleh dari sumber alam seperti kolam air,danau, sumur, dalam dan sungai. Maupun buatan seperti tangki air, air mancur dan hidran), instansi pemadam kebakaran setempat wajib menyediakan bahan pemadam bukan air (seperti bahan pemadam bukan air dapat berupa “foam” atau bahan kimia lainnya), dan aksesibilitas.

Berdasarkan hasil observasi penagamatan langsung di lapangan kondisi sarana proteksi kebakaran dilokasi hanya pasokan air yang diperoleh dari alam karena masyarakat bermukim dekat dari sungai bahkan hidran pun tidak tersedia dikawasan lokasi penelitian, sedangkan sarana lainnya seperti bahan pemadam bukan air juga tidak terpenuhi. Prasarana aksesibilitas tidak terpenuhi yang mengakibatkan keperluan jalur masuk atau putaran balik bagi aparat pemadmaan kebakaran bahkan akses masuk kedalam gedung saat terjadi kebakaran tidak terpenuhi. Berdasarkan wawancara, beberapa tahun lalu sempat terjadi kebakaran di wilayah setempat dan akses jalan lingkungan permukiman hanya bisa dilalui oleh aparat pemadam kebakaran dengan kondisi kendaraan pemadam kebakaran harus berada di luar permukiman.

b. Analisis Chi-Square

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus –20 November 2022 peneliti telah merangkum hasil kuesioner terhadap sampel yang berada di Kawasan Lingkungan Marampesu. Untuk hasil dari kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Hasil Kuesioner Penelitian

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah	Rata-Rata Alasan	Total	Variabel
1. Upaya Pengendalian permukiman kumuh	A. Adanya Upaya	91	Terkadang kalau sempat	100	Y
	B. Kadang-kadang	6	Hanya menunggu dari pemerintah yang membersihkan		
	C. Tidak ada Upaya	3	Orang lain tidak membersihkan, maka saya pun sama		
2. Berapa Rata-rata pendapatan anda perbulan?	A. Di atas 3 juta/bulan	78	PNS	100	X1
	B. 1-3 Juta/bulan	18	Pedagang warung kecil kecilan, harus mencukupi banyak orang dalam satu rumah.		
	C. Di bawah 1 juta/bulan	4	Nelayan, Buruh Lepas, Tukang Becak dan harus menghidupi banyak orang dalam satu tempat tinggal		
3. Apakah Tingkat pendidikan Anda?	A. Perguruan Tinggi	3	Menempuh pendidikan dengan lulus di perguruan tinggi	100	X2
	B. SMP-SMA	56	Putus sekolah dijenjang SMP ataupun SMA		
	C. SD-SMP	41	Tidak Bersekolah/Hanya sampai SMP/SMA		
4. Berapa Jumlah Anggota Keluarga Anda?	A. 1-3 Jiwa	54	Anggota Keluarga 1-3 orang yang tinggal dalam serumah	100	X3
	B. 3-5 Jiwa	17	Anggota Keluarga 3-5 orang yang tinggal dalam serumah		
	C. >5 Jiwa	29	Jumlah anggota keluarga lebih dari 5 orang yang tinggal dalam serumah		
5. Apakah Status Kepemilikan lahan anda? (memiliki	A. Legal	58	Status kepemilikan lahan legal/ memiliki Surat Hak Miliki/ Izin Mendirikan bangunan	100	X4

SHM/IMB)	B. Ilegal	25	Status kepemilikan ilegal/ milik pemerintah atau swasta yang bukan milik sendiri		
	C. Tanpa keterangan	17	Tidak diketahui		
6. Apakah Status kepemilikan bangunan anda?	A. Milik Sendiri	56	Bangunan milik sendiri	100	X5
	B. Kontrak	43	Tinggal kontrak/sewa milik orang lain		
	C. Tanpa Keterangan	1	Tidak diketahui		

Sumber: Kuesioner dengan warga Lingkungan Marampesu tahun 2022

1. Analisis Penyebab Permukiman Kumuh Terhadap Faktor Pendapatan

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel Faktor Pendapatan (X1) dan variabel Permukiman Kumuh (Y) maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan hasil kuesioner dengan masyarakat Kawasan Lingkungan Marampesu. Hasil rekap kuesioner kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Uji Chi Kuadrat Pengaruh Penyebab Permukiman Kumuh Terhadap Faktor Pendapatan (X1)

Y \ X	X			Σ	FH			X ²			Σ	
	1	2	3		1	2	3	1	2	3		
Y	1	7 4	1 6	1	91	70.9 8	16.3 8	3.6 4	0.1 3	0.0 1	1.91	2.05
	2	3	1	2	6	4.68	1.08	0.2 4	0.6 0	0.0 1	12.9 1	13.52
	3	1	1	1	3	2.34	0.54	0.1 2	0.7 7	0.3 9	6.45	7.61
Σ		78	18	4	100							
x ²												23,18
db												4
x ² Tabel												9,48
Kesimpulan												Berpengaruh

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat dilihat bahwa pengaruh penyebab permukiman kumuh menurut uji chi kuadrat berpengaruh terhadap faktotr pendapatan. Untuk mengukur tingkat pengaruh penyebab permukiman kumuh terhadap faktor pendapatan maka selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana :

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}} \quad C = \sqrt{\frac{17,20}{100 + 17,20}}$$

= 0,43 atau pengaruh sedang

2. Analisis Penyebab Permukiman Kumuh Terhadap Faktor Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel Faktor Tingkat Pendidikan (X2) dan variabel Permukiman Kumuh (Y) maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan hasil kuesioner dnegan masyarakat Kawasan Lingkungan Marampesu. Hasil rekap kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Uji Chi Kuadrat Pengaruh Penyebab Permukiman Kumuh Terhadap Faktor Tingkat Pendidikan (X2)

Y \ X	X			Σ	FH			X ²			Σ	
	1	2	3		1	2	3	1	2	3		
Y	1	1	54	36	91	2,73	50,96	37,31	1,10	0,18	0,05	1,32
	2	1	1	4	6	0,18	3,36	2,46	3,74	1,66	0,96	6,36
	3	1	1	1	3	0,09	1,68	1,23	9,20	0,28	0,04	9,52
Σ		3	56	41	100							
x ²												17,20
db												4

x² Tabel											9,48
Kesimpulan											Berpengaruh

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa pengaruh penyebab permukiman kumuh menurut uji chi kuadrat berpengaruh terhadap Faktor Tingkat Pendidikan, selanjutnya untuk mengukur tingkat pengaruh tersebut maka dilakukan uji kontingensi dimana :

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}} \quad C = \sqrt{\frac{17,20}{(100 + 17,20)}}$$

= 0,38 atau Pengaruh Lemah.

3. Analisis Penyebab Permukiman Kumuh Terhadap Faktor Jumlah Anggota Keluarga

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel Faktor Jumlah Anggota Keluarga (X3) dan variabel Permukiman Kumuh (Y) maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan hasil kuesioner dengan masyarakat Kawasan Lingkungan Marampesu. Hasil rekap kuesioner kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Uji Chi Kuadrat Pengaruh Penyebab Permukiman Kumuh Terhadap Faktor Jumlah Anggota Keluarga (X3)

Y	X	X			Σ	FH			X ²			Σ
		1	2	3		1	2	3	1	2	3	
Y	1	4	1	2	9	49.1	15.4	26.3	0.0	0.0	0.01	0.03
		9	5	7	1	4	7	9	0	1		
	2	4	1	1	6	3.24	1.02	1.74	0.1	0.0	0.31	0.49
									8	0		
	3	1	1	1	3	1.62	0.51	0.87	0.2	0.4	0.02	0.73
									4	7		
Σ		54	17	29	100							
x ²												1,25
db												4
x ² Tabel												9,48
Kesimpulan												Tidak Berpengaruh

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa pengaruh penyebab permukiman kumuh menurut uji chi kuadrat tidak berpengaruh terhadap Faktor Jumlah Anggota Keluarga. Selanjutnya untuk mengukur tingkat pengaruh penyebab permukiman kumuh terhadap faktor anggota keluarga maka selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}} \quad C = \sqrt{\frac{1,25}{(100 + 1,25)}}$$

= 0,11 atau pengaruh sangat lemah.

4. Analisis Penyebab Permukiman Kumuh Terhadap Faktor Status Kepemilikan Bangunan

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel Faktor Status Kepemilikan Bangunan (X4) dan variabel Permukiman Kumuh (Y) maka digunakan metode analisis Chi

Kuadrat berdasarkan hasil kuesioner dengan masyarakat Kawasan Lingkungan Marampesu. Hasil rekap kuesioner kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Uji Chi Kuadrat Pengaruh Penyebab Permukiman Kumuh Terhadap Faktor Status Kepemilikan Bangunan (X4)

Y	X	X			Σ	FH			X ²			Σ
		1	2	3		1	2	3	1	2	3	
Y	1	5	2	1	9	52.7	22.7	15.4	0.0	0.1	0.01	0.24
		5	1	5	1	8	5	7	9	3		
	2	2	3	1	6	3.48	1.5	1.02	0.6	1.5	0.00	2.13
	3	1	1	1	3	1.74	0.75	0.51	0.3	0.0	0.47	0.87
		58	25	17	100							
												3,24
												4
												9,48
												Tidak Berpengaruh

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat dilihat bahwa pengaruh penyebab permukiman kumuh menurut uji chi kuadrat tidak berpengaruh terhadap Faktor Status Kepemilikan Bangunan. Untuk mengukur tingkat Pengaruh Faktor Status Kepemilikan Bangunan maka selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}} \quad C = \sqrt{\frac{3,24}{(100 + 3,24)}}$$

= 0,18 atau pengaruh sangat lemah.

5. Analisis Penyebab Permukiman Kumuh Terhadap Faktor Status Kepemilikan Lahan

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel Faktor Status Kepemilikan Lahan (X5) dan variabel Permukiman Kumuh (Y) maka digunakan metode analisis Chi Kuadrat berdasarkan hasil kuesioner dengan masyarakat Kawasan Lingkungan Marampesu. Hasil rekap kuesioner kemudian dimasukkan pada tabel analisis Chi Kuadrat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11 Uji Chi Kuadrat Pengaruh Penyebab Permukiman Kumuh Terhadap Faktor Status Kepemilikan Lahan (X5)

Y \ X	X	X			Σ	FH			X ²			Σ
		1	2	3		1	2	3	1	2	3	
Y	1	5 3	3 9	- 1	91	50.9 6	39.1 3	0.9 1	0.08	0.0 0	4.01	4.09
	2	2	3	1	6	3.36	2.58	0.0 6	0.55	0.0 7	14.7 3	15.35
	3	1	1	1	3	1.68	1.29	0.0 3	0.28	0.0 7	31.3 6	31.70
Σ		56	43	1	100							
x ²												51,14
db												4
x ² Tabel												9,48
Kesimpulan												Berpengaruh

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, dapat dilihat bahwa pengaruh penyebab permukiman kumuh menurut uji chi kuadrat berpengaruh terhadap Faktor Status Kepemilikan Lahan. Untuk mengukur tingkat Pengaruh penyebab permukiman kumuh Terhadap Faktor Status Kepemilikan Lahan maka selanjutnya dilakukan uji kontingensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}} \quad C = \sqrt{\frac{51,14}{(100 + 51,14)}}$$

= 0,58 atau pengaruh Sedang.

C Hasil Analisis Faktor Penyebab Tumbuh Kembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan Lingkungan Marampesu Kelurahan Boribellaya

Dari hasil analisis chi kuadrat diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan sehingga bertumbuh kembangnya permukiman di Lingkungan Marampesu Kelurahan Boribellaya yaitu ada lima, yaitu:

- a Faktor Pendapatan, dapat dilihat bahwa pengaruh penyebab permukiman kumuh menurut uji chi kuadrat berpengaruh terhadap Faktor Pendapatan. Dan berdasarkan hasil uji kontingensi diketahui bahwa pengaruh faktor pendapatan terhadap pengaruh penyebab permukiman kumuh yaitu pengaruh Sedang.
- b Faktor Tingkat Pendidikan, dapat dilihat bahwa pengaruh penyebab permukiman kumuh menurut uji chi kuadrat berpengaruh terhadap Tingkat pendidikan. Dan berdasarkan hasil uji kontingensi diketahui bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengaruh penyebab permukiman kumuh yaitu pengaruh sedang.

- c Anggota Keluarga, dapat dilihat bahwa pengaruh penyebab permukiman kumuh menurut uji chi kuadrat tidak berpengaruh terhadap anggota keluarga. Dan berdasarkan hasil uji kontingensi diketahui bahwa pengaruh anggota keluarga terhadap pengaruh penyebab permukiman kumuh yaitu pengaruh sangat lemah.
- d Kepemilikan Bangunan, dapat dilihat bahwa pengaruh penyebab permukiman kumuh menurut uji chi kuadrat tidak berpengaruh terhadap kepemilikan bangunan. Dan berdasarkan hasil uji kontingensi diketahui bahwa pengaruh kepemilikan bangunan terhadap pengaruh penyebab permukiman kumuh yaitu pengaruh sangat lemah.
- e Kepemilikan Lahan, dapat dilihat bahwa pengaruh penyebab permukiman kumuh menurut uji chi kuadrat berpengaruh terhadap kepemilikan lahan. Dan berdasarkan hasil uji kontingensi diketahui bahwa pengaruh kepemilikan lahan terhadap pengaruh penyebab permukiman kumuh yaitu pengaruh Sedang.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengaruh penyebab permukiman kumuh di lingkungan marampesu kelurahan boribellaya yaitu Faktor Pendapatan, Tingkat Pendidikan dan Kepemilikan Lahan berpengaruh bagi keberadaan permukiman ini dan dengan uji

kontingensi hubungannya Faktor Pendapatan berpengaruh sedang dan Tingkat Pendidikan berpengaruh lemah, Kepemilikan Lahan berpengaruh Sedang dan untuk faktor Jumlah Anggota Keluarga dan Status Kepemilikan Bangunan tidak berpengaruh dalam kecenderungan masyarakat berhuni di kawasan Lingkungan Marampesu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Y

No.	Variabel	X ²	Hasil	C	Pengaruh
1	X1	23,18	Berpengaruh	0,43	Pengaruh Sedang
2	X2	17,20	Berpengaruh	0,38	Pengaruh Lemah
3	X3	1,25	Tidak Berpengaruh	0,09	Pengaruh Sangat Lemah
4	X4	3,24	Tidak Berpengaruh	0,16	Pengaruh Sangat Lemah
5	X5	51,14	Berpengaruh	0,64	Pengaruh Sedang

Sumber: Hasil Analisis, 2022

D Analisis Strategi Pengendalian Terhadap Tumbuh Kembangnya Permukiman Di Lingkungan Marampesu Kelurahan Boribellaya

Untuk perumusan strategi pengendalian terhadap tumbuh kembangnya permukiman di Lingkungan Marampesu Kelurahan Boribellaya maka digunakan analisis SWOT. Berikut adalah analisis SWOT untuk perumusan strateginya:

Tabel 4.13 Analisis SWOT

IFAS EFAS	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor Anggota Keluarga - Faktor Status Kepemilikan Bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor Pendapatan - Faktor Tingkat Pendidikan - Faktor Status Kepemilikan Lahan
Peluang (O)	Strategi SO	Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> - Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 200 tentang Kesejahteraan Sosial - Undang-Undang no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang 		
Ancaman (T)	Strategi ST	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> - Banjir - Kriminalitas - Tata Ruang Kota 		

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 4.14 Strategi Internal

Faktor Strategi Internal (Kekuatan)	SP	K	SP x K	Bobot
- Faktor Anggota Keluarga	12	4	48	0,5
- Faktor Status Kepemilikan Bangunan	12	4	48	0,5
Total SP x FX			96	1,00

Faktor Strategi Internal (Kelemahan)	SP	K	SP x K	Bobot
- Faktor Pendapatan	16	4	64	0,35
- Faktor Tingkat Pendidikan	16	4	64	0,35
- Faktor Status Kepemilikan Lahan	14	4	56	0,3
Total SP x FX			184	1,00

Tabel 4.15 Strategi Eksternal

Faktor Strategi Eksternal (Peluang)	SP	K	SP x K	Bobot
- Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh	14	4	56	0,35
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	14	4	56	0,35
- Undang-Undang no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang	12	4	48	0,3
Total SP x FX			160	1,00

Faktor Strategi Eksternal (Ancaman)	SP	K	SP x K	Bobot
- Banjir	12	4	48	0,3
- Kriminalitas	12	4	48	0,3
- Tata Ruang Kota	14	4	56	0,4
Total SP x FX			152	1,00

Tabel 4.16 Nilai Skor IFAS

Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan (S)		(1-4)	
- Faktor Anggota Keluarga	0,5	2	1
- Faktor Status Kepemilikan Bangunan	0,5	2	1
Total Skor			2
Kelemahan/Permasalahan (W)	Bobot	Rating	Skor
		(4-1)	

- Faktor Pendapatan	0,35	1	0,35
- Faktor Tingkat Pendidikan	0,35	1	0,35
- Faktor Status Kepemilikan Lahan	0,3	2	0,7
Total Skor			1,4

Tabel 4.17 Nilai Skor EFAS

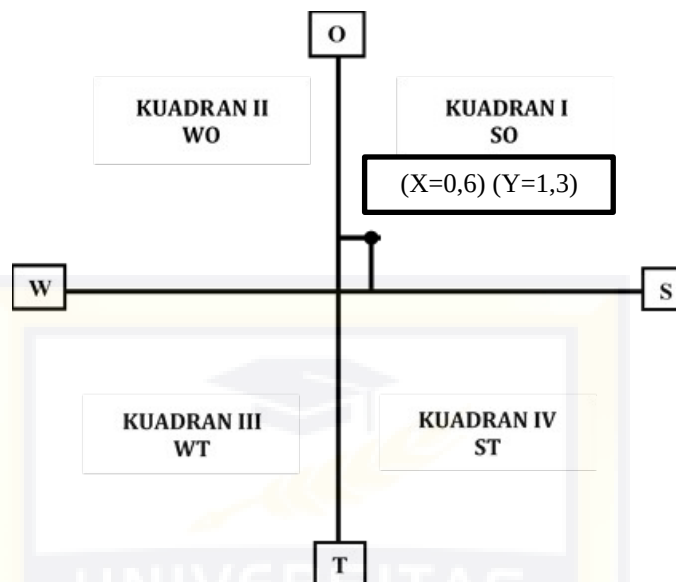
Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang (O)		(1-4)	
- Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh	0,35	3	1,05
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Sosial	0,35	3	1,05
- Undang-Undang no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang	0,3	2	0,6
Total Skor			2,7
Ancaman (T)	Bobot	Rating	Skor
		(4-1)	
- Banjir	0,3	1	0,3
- Kriminalitas	0,3	1	0,3
- Tata Ruang Kota	0,4	2	0,8
Total Skor			1,4

Kesimpulan:

- a. Penentuan titik koordinat X, (IFAS) hasil Kekuatan - Kelemahan
- b. Penentuan titik koordinat Y, (EFAS) hasil Peluang – Ancaman

$$\text{Koordinat X} = 2 - 1,4 = 0,6$$

$$\text{Koordinat Y} = 2,7 - 1,4 = 1,3$$



Gambar 4.10 Kuadran SWOT

(Hasil Analisis, 2022)

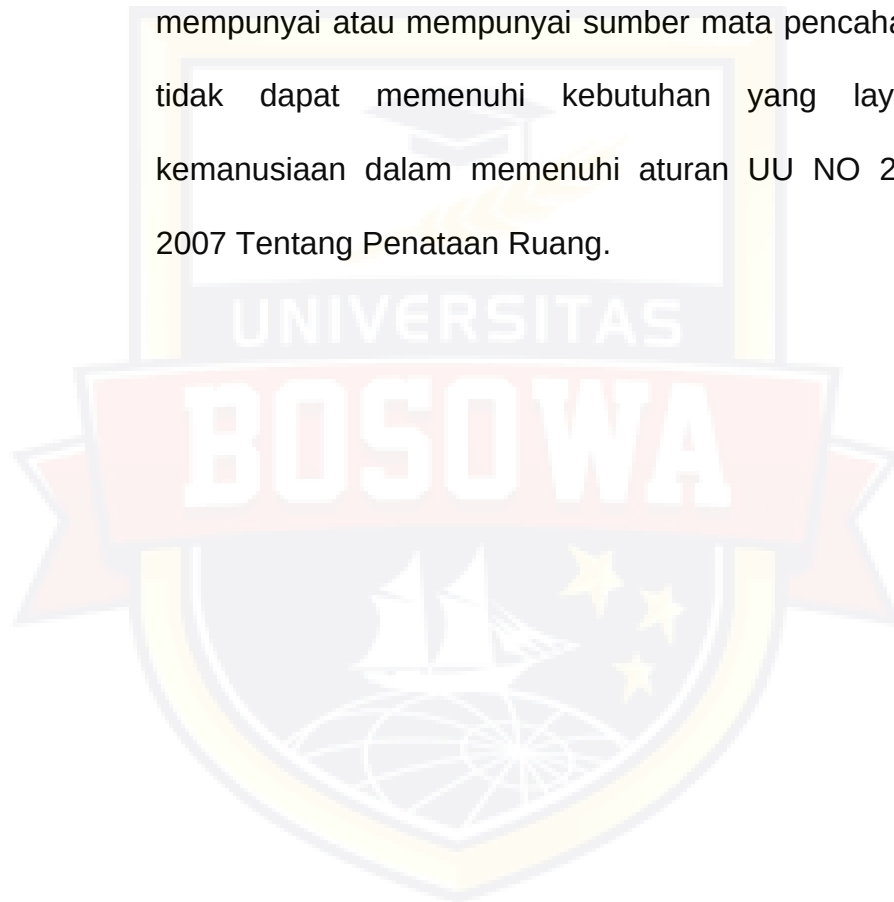
Posisi berada pada sumbu $X = 0,6$ dan sumbu $Y = 1,3$ jadi posisi pada kuadran I. Strategi yang digunakan dan diprioritaskan yaitu **Strategi SO**. Rumusan strateginya adalah dengan memanfaatkan kekuatan untuk meningkatkan peluang dalam merumuskan strategi pengendalian permukiman kumuh yang ada. Berikut adalah strategi yang digunakan untuk pengendalian tumbuh kembangnya permukiman di kawasan lingkungan Marampesu Kelurahan Boribellaya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros:

- a. Melaksanakan Program pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan Permen PUPR Nomor

14/PRT/M/2018 meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah kawasan kumuh tentang Pola penanganan Pemugaran, Peremajaan dan Pemukiman Kembali, Pasca Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.

- b. Melaksanakan Program pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 yaitu peran masyarakat dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian.
- c. Penduduk wilayah sekitar diterapkan PP 38 Tahun 2011 tentang sungai pasal 69 oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan pemberdayaan masyarakat secara terencana dan sistematis dalam pengelolaan sungai, pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan: sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat. Karena Semakin disadari bahwa keberhasilan pengelolaan sungai sangat tergantung pada partisipasi masyarakat

Penyelenggaraan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bagi seluruh warga negara Republik Indonesia yaitu Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan dalam memenuhi aturan UU NO 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terbentuknya permukiman kumuh menurut Budiharjo (2011) yaitu Faktor Pendapatan, Faktor Tingkat Pendidikan, Faktor Anggota Keluarga, Faktor Status Kepemilikan Lahan dan Faktor Status Kepemilikan Bangunan. Faktor yang berpengaruh di kawasan permukiman kumuh di Lingkungan Marampesu Kecamatan Turikale yaitu Faktor Pendapatan, Faktor Tingkat Pendidikan dan Faktor Status Kepemilikan Lahan, sedangkan faktor yang tidak berpengaruh di kawasan permukiman kumuh ini adalah Faktor Anggota Keluarga dan Faktor Status Kepemilikan Bangunan.
2. Strategi Pengendalian terbentuknya permukiman kumuh di kawasan permukiman kumuh Lingkungan Marampesu yaitu :
 - a. Melaksanakan Program pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah kawasan kumuh tentang Pola penanganan Pemugaran, Peremajaan dan Pemukiman Kembali, Pasca Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untuk

mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.

- b. Melaksanakan Program pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 yaitu peran masyarakat dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian.
- c. Penduduk wilayah sekitar diterapkan PP 38 Tahun 2011 tentang sungai pasal 69 oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan pemberdayaan masyarakat secara terencana dan sistematis dalam pengelolaan sungai, pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan: sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat. Karena Semakin disadari bahwa keberhasilan pengelolaan sungai sangat tergantung pada partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bagi seluruh warga negara Republik Indonesia yaitu Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak

mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan dalam memenuhi aturan UU no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

B. Saran

Berdaasarkan hasil kesimpulan penelitian ini agar ditindak lanjuti secara nyata, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Adapun saran dari penulis yaitu untuk peneliti berikutnya dapat mengkaji latar belakang budaya masyarakat sekitar, dan untuk masyarakat dan pemerintah sekitar dapat bersama-sama menjaga lingkungan permukiman agar menjadi kawasan yang berkelanjutan.

2. Bagi pemerintah

- a. Perlu melakukan peningkatan pembangunan sejalan dengan apa yang di tegaskan dalam UU No.4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman bahwa penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk (1) memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia; (2) Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

b. Perlu melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan permukiman kumuh di kawasan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, E. (2009). Perumahan dan Permukiman di Indonesia. *Bandung: Alumni*.
- Budihardjo, A. (2011). *Organisasi: Menuju pencapaian kinerja optimum*. Prasetiya Mulya.
- Budihardjo, E. (2009). *Penataan ruang & pembangunan perkotaan*. Alumni.
- Budihardjo, E. (1997). *Tata ruang perkotaan*.
- Badan Statistik Maros 2019, *Koordinat Statistik Kecamatan Turikale, Sulawesi Selatan 2019*, Maros : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Maros 2019, *Seksi integrasi Pengolahan data dan diseminasi statistic, Sulawesi Selatan 2019*, Maros, Badan Pusat Statistik.
- Dahlan, E. D. U. (2018). Strategi dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Ambon. *FIKRATUNA: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 8(2).
- Daldjoeni, N. (1992). *Seluk beluk masyarakat kota: pusparagam sosiologi kota dan ekologi sosial*. Alumni.
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen Buku Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gilbert, A. D. J. G., & Gugler, J. (1996). *Urbanisasi dan kemiskinan di dunia ketiga" pengantar: DR. Nasukin*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacan Yogya.
- Hamidah, N., Rijanta, R., Setiawan, B., & Rifai, M. A. (2014). Model Permukiman Kawasan Tepian Sungai Kasus: Permukiman Tepian Sungai Kahayan Kota Palangkaraya. *Jurnal Permukiman*, 9(1), 17-27.
- Kirmanto Djoko, Menteri Pekerjaan Umum 2009, *Pedoman Teknik Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan 2009*, Jakarta :Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

- Lee, E. S. (1976). Suatu Teori Migrasi Diterjemahkan oleh Hans Daeng. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Mardhanie, A. B. (2013). Penelitian Pemetaan Kawasan Kumuh Permukiman Kecamatan Tanjung Selor-Kabupaten Bulungan. *Jurnal Inersia*, 5(1).
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya. *Jurnal studi komunikasi dan media*, 15(1), 128-137.
- Menteri Pekerjaan Umum 2013, *Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2013*, Jakarta : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- Menteri Pekerjaan Umum 2016, *Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh 2016*, Jakarta : Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- Noviani, N. K., & Putra, I. G. P. Y. P. (2017). Identifikasi Lingkungan Permukiman Kumuh Kampung Kajanan. *Media Komunikasi FPIPS*, 16(1), 16-20.
- Nursyahbani, R., & Pigawati, B. (2015). Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang). *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(2), 267-281.
- Putro, J. D. (2011). Penataan kawasan kumuh pinggiran sungai di kecamatan sungai raya. *Jurnal Teknik Sipil*, 11(1).
- Peraturan pemerintah 2012, *Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 2012*, Jakarta : Peraturan pemerintah.
- Peraturan Pemerintah 2015, *Sistem Penyediaan air minum 2015*, Jakarta : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- Perda Kabupaten Maros 2012, *Rencana tata ruang wilayah kabupaten maros tahun 2012-2032*, 2012 Maros : Perda Kabupaten Maros

- Putro, J. D. (2011). Penataan kawasan kumuh pinggiran sungai di kecamatan sungai raya. *Jurnal Teknik Sipil*, 11(1).
- Ruslan, R., Widodo, K. E., & Latief, R. (2021). Strategi Pengendalian Perkembangan Permukiman Kumuh di Kasawan Lingkungan Mannaungi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. *Journal of Urban Planning Studies*, 2(1), 055-065.
- Rangkuti, Freddy.(2009). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama
- Suud, B., & Navitas, P. (2015). Faktor-faktor Penyebab Kekumuhan Permukiman di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 4(1), C33-C35.
- Syam, M. (2017). *Identifikasi Kawasan Kumuh dan Strategi Penanganan pada Permukiman Kumuh di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, P. (2002). Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural [Towards a Multicultural Indonesian Society]. *Electronically published at http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm*.
- Tjiptoherijanto, P. (1999). Urbanisasi dan pengembangan kota di Indonesia. *Populasi*, 10(2), 57-72.
- UUD 2011, *Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2011*, Jakarta : Undang-undang republik Indonesia
- UUD 2007, *Penataan ruang 2007*, Jakarta : Undang-undang republik Indonesia
- Uddin, N. (2018). Assessing urban sustainability of slum settlements in Bangladesh: Evidence from Chittagong city. *Journal of urban management*, 7(1), 32-42.
- Vernor C. Vinch dan Glenn T. Trewartha dalam Bintarto. 1977. Geografi Desa. Yogyakarta:UP.

Wisadirana, D. (2005). Metode Penelitian Pedoman Skripsi Untuk Ilmu Sosial.

Wijaya, K., Permana, A. Y., & Swanto, N. (2017). Kawasan Bantaran Sungai Cikapundung Sebagai Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Di Kota Bandung. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 1(2), 57-68.

Yudohusodo, Siswono, 1991, Rumah Untuk Seluruh Rakyat, INKOPPOL, Jakarta.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sahrul lahir di Tarere, Desa Buntu matabing, 20 Juni 1998, merupakan putra kelima dari 5 bersaudara pasangan dari Majedi Sattusng dan Paheria. Alamat rumah di Dusun Tarere, Desa Buntu Matabing Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu. Dengan riwayat pendidikan yakni Sekolah Dasar 353 Patalabunga (Tahun 2003-2004). Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah Keppe (Tahun 2011- 2013).

Sekolah Menengah Atas (Tahun 2014 -2016).Melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi swasta Universitas Bosowa Makassar melalui jalur reguler dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar, Setelah berhasil Menyelesaikan bangku kuliahnya selama 6 tahun yaitu pada tahun 2023.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan-kegiatan baik intra kampus maupun ekstra kampus. Penulis juga aktif dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Perencanaan Indonesia Koordinator Wilayah Indonesia Timur (IMPI-IT) sebagai anggota Divisi Komunikasi Informasi dan Advokasi periode 2017-2018, serta aktif menjadi pengurus di Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMPWK) Universitas Bosowa Makassar yakni menjabat sebagai anggota bidang Hubungan Masyarakat Periode 2019-2020. Penulis juga pernah aktif di kepanitian kegiatan Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMPWK) sebagai Sekretaris Panitia PLANOFACE Vol.3.